

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
DI KELURAHAN PENINGGILAN KOTA TANGERANG
TAHUN 2009**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :
TETALI PUJI RAHAYU
NIM. 072751

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2011**

ABSTRAK

Tetali Puji Rahayu, NIM 072751, Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan Tahun 2009. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2011. Pembimbing I Maulana Yusuf, S.IP, M.Si. Pembimbing II Hj. Ima Maisaroh, S.Ag, M.Si.

Kata Kunci : Evaluasi, PNPM Mandiri

Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan Tahun 2009. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan Tahun 2009. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan merupakan orang yang mengetahui tentang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan Tahun 2009 berjalan dengan cukup baik. Saran yang dapat peneliti berikan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan Tahun 2009 yaitu para pemangku kebijakan terkait khususnya BKM harus lebih jeli lagi dalam menentukan sasaran penerima manfaat dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan.

ABSTRACT

Tetali Puji Rahayu, NIM 072751, Evaluation of Implementation National Community Empowerment Program (PNPM) of Independent In Urban Village of Peninggilan at 2009. The Study Program of Public Administration, The Faculty of Social And Political Science, University of Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2011. The First Advisor Maulana Yusuf, S.IP, M.Si. The Second Advisor Hj. Ima Maisaroh, S.Ag, M.Si.

Key words : Evaluation, PNPM Mandiri

Focus of this research is Evaluation of Implementation National Community Empowerment Program (PNPM) of Independent In Urban Village of Peninggilan at 2009. This research purpose for to know how evaluation of implementation national community empowerment program (PNPM) of independent in urban village of Peninggilan at 2009. The theory used in this research that the theory of policy evaluation by William N. Dunn. The research of method used is descriptive method with qualitative approaches. This research used purposive sampling technique that is sampling the data source with the consideration that people who become informants are people who know about the implementation of national community empowerment program (PNPM) of independent at research sites. Based on the results of research that has been done, can be conclude that the evaluation of implementation national community empowerment program (PNPM) of independent in urban village of Peninggilan at 2009 has been good. Suggestion that researcher give to the implementation of national community empowerment program (PNPM) of independent in urban village of Peninggilan at 2009 as well acting specifically related policies should be more BKM yet to determine the target beneficiaries of the activities of national community empowerment program (PNPM) of independent in urban village of Peninggilan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridho dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan Kota Tangerang Tahun 2009”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karna masih ada kekurangan yang semata-mata muncul karena keterbatasan wawasan penulis. Untuk itu, demi kesempurnaan proposal penelitian ini, segala kritik dan saran pembaca sepenuhnya akan penulis perhatikan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas oleh dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkannya sehingga dapat tersusun skripsi ini. Kedua Orang tua serta keluarga yang selalu memberikan semangat, pembelajaran, nasihat, kasih sayang, hiburan, omelan serta bantuan yang tidak ternilai. Ucapan terima kasih pun saya haturkan juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rahman Abdullah, M.Sc. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sihabuddin, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

3. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
4. Rahmi Winangsih, Dra, M.Si., Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
5. Bapak Idi Dimyati, S.Ikom., Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.
6. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Dosen Pembimbing Akademik..
7. Bapak Maulana Yusuf, S.IP, M.Si., Dosen Pembimbing MPA dan Dosen Pembimbing Skripsi I.
8. Ibu Hj. Ima Maisaroh, S.Ag, M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi II.
9. Para Dosen dan staff TU Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala sumbangsuhnya.
10. Bapak Ari, staff bagian Asmandat Korkot Kota Tangerang. Terimakasih atas data-data yang telah diberikan.
11. Bapak Ahmad Humaedi, Senior Fasilitator Kelurahan Peninggilan. Terima kasih atas bantuan data dan penjelasannya mengenai PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan.
12. Pengurus BKM Amanah Peninggilan. Terima kasih atas bantuan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya.

13. Masyarakat Peninggilan yang turut mendukung kelancaran skripsi saya.
14. Gita Giatmika Mardi, Amk. Terima kasih atas dukungan, dan jasa transportasinya selama penyusunan skripsi ini.
15. Zahrotul Addawiyah, Rina Andriana, Tri Purwita Sari, Tri Setya Puspasari yang sedikit banyaknya memberikan bantuan, hiburan, kegilaan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Tetap semangat ya teman.
16. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2007 kelas C yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Serang, Agustus 2011

Tetali Puji Rahayu
Nim : 072751

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | |
| LEMBAR PERSETUJUAN | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | |
| ABSTRAK | |
| <i>ABSTRACT</i> | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 14 |
| 1.3. Batasan dan Rumusan Masalah | 14 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 15 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR | 18 |
| 2.1. Deskripsi Teori..... | 18 |
| 2.1.1. Kebijakan Publik..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik | 21 |
| 2.1.3. Pengertian Evaluasi..... | 27 |
| 2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik | 28 |
| 2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat | 37 |
| 2.1.6. Deskripsi PNPM Mandiri..... | 40 |
| 2.2. Kerangka Berfikir | 44 |
| 2.3. Asumsi Dasar | 45 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 46 |
| 3.1. Metode Penelitian | 46 |
| 3.2. Instrumen Penelitian | 47 |
| 3.3. Informan Penelitian..... | 50 |
| 3.4. Teknik Analisis Data | 52 |
| 3.5. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data..... | 55 |
| 3.6. Lokasi Dan Jadwal Penelitian..... | 57 |
| 3.6.1. Lokasi Penelitian..... | 57 |
| 3.6.2. Jadwal Penelitian..... | 57 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 58 |
| 4.1. Deskripsi Objek Penelitian | 58 |
| 4.1.1. Deskripsi Wilayah Kelurahan Peninggilan | 58 |
| 4.1.2. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelurahan Peninggilan | 59 |
| 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian | 62 |
| 4.2.1. Efektifitas | 62 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 4.2.2. Efisiensi..... | 78 |
| 4.2.3. Kecukupan | 99 |
| 4.2.4. Perataan..... | 104 |
| 4.2.5 Responsifitas | 111 |
| 4.2.6. Ketepatan | 120 |
| 4.3. Temuan Lapangan..... | 129 |
| BAB V PENUTUP..... | 132 |
| 5.1. Kesimpulan | 132 |
| 5.2. Saran | 133 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|----------|---|
| Tabel 1 | Pembangunan Paving Blok BKM Amanah Tahun 2009 9 |
| Tabel 2 | Perbaikan Saluran Air BKM Amanah Tahun 2009 10 |
| Tabel 3 | Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn..... 31 |
| Tabel 4 | Tiga Pendekatan Evaluasi 36 |
| Tabel 5 | Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 57 |
| Tabel 6 | Perbaikan Saluran Air BKM Amanah Tahun 2009 70 |
| Tabel 7 | Pembangunan Paving Blok BKM Amanah Tahun 2009 75 |
| Tabel 8 | Perbaikan Saluran Air BKM Amanah Tahun 2009 86 |
| Tabel 9 | Pembangunan Paving Blok BKM Amanah Tahun 2009 90 |
| Tabel 10 | Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan Tahun 2009 Program Perbaikan Rumah 127 |
| Tabel 11 | Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan Tahun 2009 Program Perbaikan Saluran Air 128 |
| Tabel 12 | Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan Tahun 2009 Program Pembangunan Paving Blok 128 |
| Tabel 13 | Status Kondisi Pembangunan Infrastruktur PNPM Mandiri Di Kelurahan Peninggilan Tahun 2009 130 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1 Kerangka Berfikir | 45 |
| Gambar 2 Analisis data menurut Miles & Huberman..... | 53 |
| Gambar 3 Siklus Pelaksanaan PNPM Mandiri Di Masyarakat | 64 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat ijin Penelitian
- Lampiran 2 Catatan Lapangan
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Petunjuk Teknis Pencairan Dana BLM PNPM MP
- Lampiran 5 Member Check
- Lampiran 6 Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani. Selain itu kemiskinan juga merupakan masalah yang cukup kompleks dan memerlukan campur tangan serta partisipasi dari semua pihak untuk menyelesaikannya. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah ketidakpunyaan akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, pemerintah meluncurkan berbagai program pembangunan yang dimaksudkan untuk menangani masalah kemiskinan. Namun sayangnya, program penanganan kemiskinan tersebut masih belum optimal.

Pada kenyataannya program terdahulu sering menimbulkan kondisi yang kurang menguntungkan, seperti pemberian bantuan yang salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi, dan melemahkan kapital sosial di masyarakat. Melemahnya kapital sosial mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama. Kondisi kapital sosial yang

melemah dan memudar di masyarakat salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan, dan tindakan dari pengelola program kemiskinan yang cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpedulian di masyarakat.

Peran dunia usaha dan masyarakat yang kurang optimal serta mulai lunturnya jiwa sosial dalam kehidupan masyarakat yang bisa menjadi sumber penting untuk pemberdayaan dan pemecahan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri. PNPM mandiri dilaksanakan pada tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal pasca konflik dan bencana.

Melalui PNPM mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga tahap evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan lagi berperan sebagai objek penanggulangan kemiskinan, melainkan sebagai subjek

penanggulangan kemiskinan. Mulai tahun 2008, PNPM mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor atau departemen dan pemerintah daerah. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu lima sampai enam tahun, maka PNPM mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan millennium atau *Millenium Development Goals* (MDGs).

Pada dasarnya PNPM mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud disini adalah upaya menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya

penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PNPM terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Berikutnya tujuan khusus dari program PNPM mandiri adalah meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar representatif dan akuntabel juga menjadi tujuan khusus dari program ini.

Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada rakyat miskin (*pro-poor*). Tujuan khusus berikutnya yaitu meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal, meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat juga menjadi tujuan khusus dari program PNPM mandiri.

Ruang lingkup program PNPM mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat yang meliputi penyediaan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin terutama untuk kaum perempuannya. Selain itu, ruang lingkup kegiatan program ini terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta pencapaian tata pemerintahan yang baik juga termasuk ke dalam ruang lingkup program PNPM mandiri.

Bantuan untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan dan bantuan stimulan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bantuan pendampingan diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-

masing. Selanjutnya yaitu bantuan dalam bentuk dana BLM yang bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan dan ditetapkan pada PJM Pronangkis. Besar dana BLM yang dikucurkan tergantung pada jumlah penduduk di kelurahan yang bersangkutan. Pencairan dana BLM dilakukan melalui tiga tahap, tahap pertama dana yang dikucurkan yaitu 30% dari dana yang diajukan, kemudian tahap kedua 50% dan tahap ketiga 20%.

Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan. PNPM Mandiri melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial, dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum, serta peraturan yang berlaku. Bagi pemerintah daerah maupun stakeholder di daerah yang bersangkutan, bantuan teknis pendampingan peningkatan kapasitas pemprov, pemkot atau pemkab pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*), khususnya dalam menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang universal. Untuk itu, dalam pelaksanaan kegiatan PNPM

mandiri diperlukan proses monitoring dan evaluasi agar semua kegiatannya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program PNPM mandiri di kelurahan Peninggilan dimulai pada tahun 2009 telah mencakup 20 RT dan 12 RW. PNPM mandiri di kelurahan Peninggilan merupakan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang pelaksanaannya kurang berhasil. Dengan adanya PNPM mandiri di kelurahan Peninggilan, diharapkan masyarakat Peninggilan bisa lebih mandiri serta bisa menumbuhkan rasa kepercayaan pada diri masyarakat untuk berdaya pikir dalam memanfaatkan dana BLM yang diberikan untuk memperbaiki hidupnya secara optimal.

Dalam rangka menyusun kebutuhan riil masyarakat, dilakukan proses Pemetaan Swadaya (PS) oleh masyarakat, analisa masalah dan potensi, serta merumuskan kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah pengawasan yang dilakukan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperhatikan seluruh wujud proses kegiatan penyusunan PJM yang dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat kelurahan Peninggilan. Pada proses Pemetaan Swadaya (PS) terdapat dua tim yang digabungkan menjadi satu yaitu tim Pemetaan Swadaya dan tim Perencanaan Partisipatif. Penggabungan dua tim tersebut dimaksudkan untuk untuk memudahkan kajian-kajian data yang berkaitan dengan permasalahan di tingkat basis atau tingkat KSM pada PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan .

Berdasarkan Laporan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2009, pagu dana yang didapat Kota Tangerang yaitu

sebesar Rp. 18.100.000.000,- (delapan belas milyar seratus juta rupiah) dan dialokasikan untuk seratus empat kelurahan yang ada di Kota Tangerang yang salah satunya adalah kelurahan Peninggilan. Pada tahun 2009 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Kelurahan Peninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar dua ratus juta rupiah. Dana BLM tersebut turun berdasarkan usulan kegiatan masyarakat yang sudah diskala prioritas atau istilah lainnya disebut dengan Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK). Melalui proses penentuan prioritas tersebut diperoleh kesepakatan agar keseluruhan dari dana tersebut digunakan untuk kegiatan infrastruktur. Berdasarkan *Best Practice BKM Amanah Kelurahan Peninggilan Tahun 2009*, pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk kegiatan infrastruktur sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan untuk Biaya Operasional Prosedur (BOP) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat Peninggilan yang di wilayahnya masih terdapat jalan-jalan yang rusak, saluran air yang kurang baik atau rumah tidak layak huni dan mampu untuk berswadaya agar kegiatan yang dilakukan di lingkungannya nanti akan berjalan dengan baik.

Dana tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk bidang ekonomi bergulir, namun berdasarkan pengalaman ekonomi yang kurang baik pada tahun 2000 jadi pada periode tahun 2009 ini khusus untuk kegiatan ekonomi bergulir dan sosial ditiadakan. Hal ini juga sesuai permintaan dari pemerintah kota Tangerang untuk

meniadakan program ekonomi bergulir tahun 2009 dan memfokuskan pada kegiatan infrastruktur sampai BKM dan masyarakat benar-benar siap dalam menjalankan program ekonomi bergulir. Selain itu hal ini juga disebabkan karna pada tahun 2009 lembaga panging dari PNPM Mandiri berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 lembaga panging PNPM Mandiri adalah IDB (*Islamic Development Bank*). IDB memiliki kiblat yang berbeda dengan lembaga panging sebelumnya, hal ini dikarenakan pada prinsipnya dana yang diberikan oleh IDB hanya di khususkan untuk kegiatan infrastruktur saja. Sedangkan kegiatan ekonomi dan sosial harus dari dana DDUB. Dalam kegiatan infrastruktur ini, BKM memiliki tiga kegiatan yaitu pembangunan paving blok, perbaikan saluran air, dan perbaikan rumah tidak layak huni.

Pembangunan paving blok dilakukan pada delapan KSM dengan volume yang berbeda-beda. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pembangunan Paving Blok BKM Amanah Tahun 2009

| Nama KSM | Lokasi | Nilai rencana Swadaya | Nilai Realisasi Swadaya | Nilai BLM PNPM | Total Dana |
|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Sejati | RT. 01/ 04 | Rp. 2.850.000,- | Rp. 4.130.000,- | Rp. 14.250.000,- | Rp. 18.380.000,- |
| Barokah | RT. 02/ 11 | Rp. 5.500.000,- | Rp.12.681.000,- | Rp. 27.500.000,- | Rp. 40.181.000,- |
| Bina Sejahtera | RT. 01/ 13 | Rp. 5.000.000,- | Rp. 6.242.000,- | Rp. 25.000.000,- | Rp. 31.242.000,- |
| Bina Umat I | RT. 01/ 01 | Rp. 3.200.000,- | Rp. 8.313.000,- | Rp. 16.000.000,- | Rp. 24.313.000,- |
| Hasanah | RT. 01/ 07 | Rp. 2.850.000,- | Rp.13.537.000,- | Rp. 14.250.000,- | Rp. 27.787.000,- |
| Berhasil | RT. 02/ 04 | Rp. 1.950.000,- | Rp. 2.760.000,- | Rp. 9.250.000,- | Rp. 12.010.000,- |
| Usaha Bersama | RT. 01/ 11 | Rp. 2.300.000,- | Rp. 8.409.000,- | Rp. 16.250.000,- | Rp. 24.659.500 |
| Makmur | RT. 02/ 13 | Rp. 5.800.000,- | Rp.10.311.500,- | Rp. 29.000.000,- | Rp. 39.311.550 |

(Sumber: LPJ KSM Lingkungan Tahun 2009)

Berdasarkan tabel diatas, pembangunan paving blok oleh BKM Amanah telah dilakukan pada delapan KSM dengan lokasi dan volume yang berbeda-beda.

Nilai rencana swadaya yang tercantum dalam tabel diatas merupakan nilai dana swadaya awal yang dimiliki oleh KSM sebelum pembangunan dilaksanakan. Ketika pembangunan telah dilaksanakan muncul nilai realisasi swadaya yang dimiliki oleh KSM, nilai BLM dari PNPM Mandiri, dan total dana yang dikeluarkan ketika pembangunan dilaksanakan. Nilai realisasi swadaya nantinya bisa menjadi lebih besar atau sama dengan nilai rencana swadaya. Hal ini terjadi karena adanya sumbangan warga berupa konsumsi ataupun alat kerja ketika pembangunan dilaksanakan. Selain itu, hal ini juga terjadi karena adanya pekerjaan bongkar pasang paving blok yang menyebabkan penambahan atau pengurangan paving blok sehingga mengharuskan para KSM atau masyarakat untuk menambah dana swadaya dan juga menyebabkan nilai realisasi swadaya lebih besar dari rencana.

Kegiatan kedua yaitu perbaikan saluran air yang dilakukan pada KSM Bina Umat II dan KSM Seroja. Rinciannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Perbaikan Saluran Air BKM Amanah Tahun 2009

| Nama KSM | Lokasi | Nilai Rencana Swadaya | Nilai Realisasi Swadaya | Nilai BLM PNPM | Total dana |
|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Bina Umat II | RT. 02/ 09 | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.350.000,- | Rp. 16.750.000,- | Rp. 20.100.000,- |
| Seroja | RT. 01/ 07 | Rp. 3.250.000,- | Rp. 3.250.000,- | Rp. 16.250.000,- | Rp. 19.500.000,- |

(Sumber: LPJ KSM Lingkungan Tahun 2009)

Perbaikan saluran air BKM Amanah tahun 2009 dilakukan di KSM Bina Umat II dan KSM Seroja di lokasi yang berbeda. Perbaikan saluran air di KSM Bina Umat II menghabiskan dana sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus

ribu rupiah). Dana tersebut berasal dari dana swadaya masyarakat yang berasal dari kas KSM dan sumbangan warga berupa alat kerja dan konsumsi sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dana BLM PNPM Mandiri sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Perbaikan saluran air yang kedua dilakukan di KSM Seroja yang menghabiskan dana sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut berasal dari dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari dana BLM PNPM Mandiri sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada kegiatan perbaikan saluran air ini tidak terdapat selisih dana antara dana rencana swadaya dengan dana realisasi swadaya. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan perbaikan saluran air tidak ada pekerjaan tambah kurang seperti pada pembangunan paving blok, sehingga nilainya sesuai dengan rencana swadaya.

Kegiatan infrastruktur terakhir yaitu perbaikan satu unit rumah dengan luas 5,2x 7,0 meter persegi yang berlokasi di RT. 01/ 07 kelurahan Peninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Perbaikan satu unit rumah di lokasi ini menghabiskan dana sebesar sebelas juta rupiah. Dana tersebut berasal dari dana swadaya yang dimiliki oleh KSM Basma sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dana BLM yang diberikan PNPM Mandiri sebesar Rp. 8.000.000,- delapan juta rupiah.

Untuk mendukung kelancaran dari kegiatan infrastruktur ini, BKM Amanah meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Misalnya dengan mengajukan usulan kegiatan perbaikan infrastruktur beserta nama-nama anggota yang akan menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayah mereka dalam satu proposal. Selain itu, masyarakat juga menyiapkan daftar dana swadaya yang dimiliki wilayahnya agar kebutuhan masyarakat dalam memenuhi target perbaikan lingkungannya dapat terealisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dana swadaya yang dimiliki tiap wilayah sebagian berasal dari kas KSM dan sebagiannya lagi berasal dari sumbangan warga berupa konsumsi dan alat kerja (mis: cangkul, sekop, meteran,dll) yang mendukung kegiatan perbaikan infrastruktur di wilayah mereka. Kegiatan perbaikan dan atau pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik bila didukung dengan adanya komitmen dan kemauan yang kuat dari BKM Amanah dan masyarakat Peninggilan dalam rangka memperbaiki wilayahnya.

Pengucuran dana yang dilakukan oleh BKM Amanah tergantung pada jumlah dana yang tercantum pada proposal dan kegunaan dana tersebut. KSM tidak bisa sembarangan dalam mencantumkan jumlah dana yang dibutuhkan karena setelah proposal tersebut diajukan akan ada tim survei dari PNPM mandiri yang akan mengecek langsung ke lapangan. Salah satu syarat pengucuran atau pencairan dana yang telah diajukan yaitu para KSM harus menyediakan kontribusi swadaya, uang, dan atau lainnya dalam jumlah yang sesuai dengan usulan kegiatan atau RAB (Rancangan Anggaran Biaya). Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam petunjuk teknis pencairan dana BLM PNPM Mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, kegiatan observasi, serta wawancara tidak terstruktur yang dilakukan peneliti, terlihat adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PNPM mandiri yang diantaranya yaitu :

Pertama, masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan. Misalnya ketidakaan komputer di kantor sekretariat BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, padahal pada dasarnya komputer tersebut sangat penting untuk mendukung penyusunan agenda kegiatan, pembuatan surat-surat dan atau laporan-laporan kegiatan.

Kedua, masih ada masyarakat atau KSM yang kurang mengeti akan tata cara atau tahapan pengucuran dana BLM yang dilakukan oleh BKM melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK). Masyarakat atau KSM berasumsi bahwa pengucuran dana yang dilakukan oleh BKM Amanah dilakukan sekaligus. Padahal pada kenyataannya pengucuran dana yang dilakukan BKM Amanah kepada masyarakat dilakukan melalui tiga tahap yaitu tiga puluh persen, lima puluh persen, dan dua puluh persen.

Ketiga, lemahnya tata cara pengarsipan di BKM Amanah. Hal ini bisa dilihat dari pengaturan berkas dan file yang tidak pada tempatnya. Seharusnya, file-file atau berkas-berkas yang ada di kantor sekretariat BKM Amanah tertata dengan rapi agar memudahkan mereka dalam mencari berkas yang diperlukan.

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan pada PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan, bisa dilihat bahwa selama pelaksanaan PNPM Mandiri masih ada masyarakat yang kurang mengerti akan tujuan dari diadakannya PNPM

di kelurahan tersebut, sehingga menghambat pelaksanaan PNPM agar bisa menjadi optimal. Hal inilah yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai **"Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan Kota Tangerang Tahun 2009"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi dan kegiatan wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan pengucuran dana BLM dalam program pembangunan infrastruktur.
3. Lemahnya tata cara pengarsipan di BKM Amanah Kelurahan Peninggilan.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan ini pada Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun 2009 di Bidang Infrastruktur.

1.3.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dinyatakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan Kota Tangerang Tahun 2009?”

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di kelurahan Peninggilan Kota Tangerang tahun 2009.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat penelitian secara teoritis

1. Menambah wawasan peneliti mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan mengenai evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di kelurahan Peninggilan Kota Tangerang pada tahun 2009.
3. Dapat dijadikan sebagai pedoman serta pemahaman bagi penelitian berikutnya.

1.5.2. Manfaat penelitian secara praktis

Dapat dijadikan masukan bagi tim pelaksana PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan Kota Tangerang dalam melaksanakan program ini sekaligus sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan PNPM Mandiri.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

Bab ini mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu terdapat pula asumsi dasar dan kerangka berfikir yang menggambarkan arah penelitian nantinya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode apa yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang instrumen penelitian, teknik

pengumpulan data, informan penelitian, teknik analisis data, dan uji validitas.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mencakup deskripsi objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari objek yang diteliti, serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu juga mencakup deskripsi data yang menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dengan menggunakan teknik analisa data yang relevan. Kemudian dalam bab ini juga terdapat interpretasi hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu bagian kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari analisis dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya. Sedangkan pada bagian saran akan dikemukakan saran demi perbaikan dan pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

2.1. Deskripsi Teori

Deskripsi teori memuat tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian, peneliti berpedoman pada teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan pada saat peneliti melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan PNPM mandiri di Kelurahan Peninggilan. Oleh karena itu, landasan teori yang digunakan peneliti adalah :

2.1.1. Kebijakan Publik

Public Policy yang sering diterjemahkan secara bebas sebagai kebijakan, dalam khasanah ilmu administrasi publik dimaknai secara beragam. Robert Eyestone dalam Agustino (2008: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Di sisi lain, James Anderson (*Op. Cit: 7*) memberikan pengertian atas kebijakan publik dalam bukunya *Public Policy Making* yaitu “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Konsep ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud.

Thomas R. Dye (*Ibid*) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui definisi ini, didapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik (*Op. Cit: 8*)

- a. Pada umumnya perhatian kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dengan yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dalam bahasa yang lebih komprehensif, Lester dan Stewart (2000) dalam Wibowo (2004: 29) memberikan usulan definisi kebijakan publik, yaitu ”proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil ataukah masih direncanakan (*imagined*)”. Dalam konseptualisasi tersebut, kebijakan publik memiliki karakteristik dimana kebijakan akan diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh kewenangan atau otoritas yang berada dalam sistem politik yang bisa saja berupa anggota legislatif, eksekutif, hakim, ataupun administrator. Satu hal yang perlu dicatat yaitu kebijakan publik selalu menjadi subjek yang akan

diubah berdasarkan informasi-informasi yang lebih baru dan lebih baik yang diperoleh berkaitan dengan efek yang timbul dari kebijakan tersebut.

Stone (*Op. Cit.*: 30) menyatakan bahwa ”kebijakan publik secara mendasar merupakan upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal yang diantaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efisiensi, keamanan, kebebasan serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri”. Poin-poin tersebut seringkali dijadikan sebagai justifikasi dari kebijakan, tindakan pemerintah, atau juga pertimbangan apakah pemerintah akan segera melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Selain itu poin-poin itu juga dipakai sebagai kriteria untuk mengevaluasi program-program publik, dalam hal ini poin-poin tersebut berfungsi sebagai standar atas program yang dievaluasi tersebut.

Terdapat dua pembagian jenis kebijakan publik, pembagian pertama dari kebijakan publik adalah dari makna kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang harus diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Contohnya yaitu pemerintah memutuskan untuk memasuki usaha-usaha ekonomi persenjataan, perpupukan, penerbangan. Namun disisi lain pemerintah tidak memilih usaha ekonomi lain yang bersifat besar dan menghasilkan laba besar seperti *consumer goods*, industri pulp&paper, minyak goreng. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Menurut Riant Nugroho D. (2004:54) kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam

bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yaitu yang disebut sebagai konvensi.

Kebijakan publik hadir dengan tujuan untuk tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama, untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai :

”Pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Sedangkan, Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (*Ibid*), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

”Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu ataupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Berdasarkan dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr dalam (*Ibid*) bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (*Op. Cit:* 140) yang mengatakan bahwa :

”Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”

Disamping itu, keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga dapat diukur, hal ini diutarakan oleh Merrile Grindle (*Ibid*) sebagai berikut :

”Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Terdapat beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dipaparkan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

a. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan implementasi ini disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan

publik. Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn (*Op. Cit.* 142-144), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- b. Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
- c. Karakteristik agen pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.
- d. Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang akan pelaksana kebijakan laksanakan merupakan kebijakan ”dari atas” (top down) yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga atau masyarakat ingin selesaikan.
- e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dengan kata lain bisa disebut dengan koordinasi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakn. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A FrameWork for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini

berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar (*Op. Cit.*:145-148), yaitu :

- a. Mudah Atau Tidaknya Masalah Yang Akan Digarap
Mudah atau tidaknya masalah yang digarap meliputi kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, serta tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
- b. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat
Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, dan akses formal.
- c. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi
Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi meliputi kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, serta kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

c. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model implementasi ini dinamakan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan ini, ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi .

- a. **Komunikasi**
Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
- b. **Sumberdaya**
Sumberdaya dalam implementasi kebijakan meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang kurang memadai, tidak mencukupi, atau tidak kompeten di bidangnya. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, namun di sisi lain efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Fasilitas juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama fasilitas fisik. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya fasilitas fisik atau pendukung berupa sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- c. **Disposisi**
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga nantinya tidak terjadi bias dalam prakteknya.
- d. **Struktur Birokrasi**
Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan sudah tersedia, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

d. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Pendekatan ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Grindle (*Op. Cit.*:154) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin

diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle (*Ibid*), dimana pengukuran implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, serta tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle (*Op. Cit: 154*) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*

A. *Content of Policy* menurut Grindle (*Op. Cit: 154-155*) adalah:

- a. *Interest Affected*, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Suatu kepentingan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- b. *Type of Benefits*. Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of Change Envision*. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.
- d. *Sit of Decision Making*. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan
- e. *Program Implementer*. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f. *Resources Committed*. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle (*Op. Cit.*: 156) adalah:

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b. *Institution and Regime Characteristic*. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. *Compliance and Responsiveness*. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana kebijakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.1.3. Pengertian Evaluasi

Menurut Riduan, M dkk (1999:131) evaluasi merupakan ”penaksiran, penilaian, perkiraan keadaan, penentuan nilai hal”. Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation* yang berarti ”penilaian atau penaksiran” (John M. Echols dan Hasan Shadily. 1983:75). Menurut Lester dan Stewart (2000:16) dalam Agustino (2006: 175) evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2005: 1), evaluasi adalah ”kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil

keputusan”. Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam dalam Daryanto (2005:2) yaitu ”proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif pengambilan keputusan”. Maksudnya dalam hal ini penilaian dilakukan pada suatu program dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan sebuah program. Evaluasi juga mencakup pengukuran dan penilaian terhadap suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan atau kegiatan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau belum.

2.1.4. Evaluasi Kebijakan Publik

Bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan adalah Evaluasi Kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara ”harapan” dengan ”kenyataan”. Umumnya ketika kita berbicara mengenai evaluasi kebijakan, maka pemikiran kita akan dihubungkan dengan perkiraan atau penaksiran atas kebijakan yang sedang diimplementasikan. Evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri.

Mengikuti William N. Dunn (1999) dalam Nugroho D. (2004:185), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi juga memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemmilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meski berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008: 185) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan dari suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sehingga dari pernyataan Lester dan Stewart dapat disimpulkan bahwa dengan adanya evaluasi maka kita bisa melihat kegagalan yang terjadi pada suatu kebijakan dan bisa mengantisipasinya pada kebijakan selanjutnya sehingga tidak terjadi kegagalan pada kebijakan berikutnya, dan menilai apakah suatu kebijakan tersebut bisa menghasilkan dampak yang diinginkan atau tidak.

Evaluasi biasanya juga ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituennya. Evaluasi juga

diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”, seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Sehingga evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif.

Pada dasarnya, ketika seseorang ingin melakukan evaluasi kebijakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Dalam hal ini evaluasi berfungsi untuk menilai aspek instrument (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari pengguna instrument tadi.
2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan public yang ada.
3. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi Kebijakan secara sederhana menurut William Dunn (*Op. cit.*: 187) berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya evaluasi kebijakan kita bisa mendapatkan

informasi dan melihat hasil dari kebijakan yang telah dilakukan, apakah hasil kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada atau tidak, dan apakah kebijakan tersebut bisa memberi manfaat bagi stakeholder yang terkait atau tidak.

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 3

Kriteria Evaluasi menurut William N. Dunn

| TIPE KRITERIA | PERTANYAAN | ILUSTRASI |
|----------------------|--|---|
| Efektifitas | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? | Unit pelayanan |
| Efisiensi | Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? | Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat |
| Kecukupan | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah? | Biaya tetap (masalah tipe I) Efektifitas tetap (masalah tipe II) |
| Perataan | Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? | Kriteria pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls |
| Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuaskan, kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? | Konsistensi dengan survei warga negara |
| Ketepatan | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? | Program publik harus merata dan efisien |

(Sumber: Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 610)

Kriteria evaluasi menurut William N. Dunn diantaranya yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

3. Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan

Dalam hal ini perataan disamakan dengan kesamaan yang berhubungan erat dengan konsepsi keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan kebijakan maupun hasil dari kebijakan itu sendiri.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan dan menanggapi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan berkenaan dengan hasil atau tujuan yang diinginkan dari kebijakan yang dibuat.

Evaluasi kebijakan dikatakan bernilai dan bermanfaat bila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik. Ada tiga fungsi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003:610) yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
- b. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Jadi, meski berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Menurut Samodra Wibawa, dkk (1993) dalam Nugroho D (2004:186), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi :

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari sini, para evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut William N. Dunn (2003:608) terdapat sejumlah karakteristik yang membedakan evaluasi kebijakan dengan metode analisis kebijakan lainnya yaitu :

- a. *Fokus nilai*
Evaluasi dipusatkan pada penilaian yang menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan social dari suatu kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.
- b. *Interdependensi fakta-nilai*
Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi atau terendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil kebijakan berharga sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.
- c. *Orientasi masa kini dan masa lampau*
Tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang dimasa depan
- d. *Dualitas nilai*
Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi selama berkenaan dengan nilai yang ada dapat dinggap sebagai intrinsik ataupun ekterinsik.

Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan.

3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.

Dalam evaluasi kebijakan, Dunn mengembangkan tiga pendekatan, yaitu Evaluasi Semu, Evaluasi Formal, dan Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan manfaat atau nilai hasil-hasil tersebut pada target kebijakan. Evaluasi semu berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti sendiri atau *self evident* atau tidak kontroversial.

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Evaluasi formal berasumsi bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai adalah tujuan dan target yang diumumkan secara formal.

Evaluasi keputusan Teoritis (Decision Theoretic Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam. Komparasi ketiga pendekatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Tiga Pendekatan Evaluasi

| Pendekatan | Tujuan | Asumsi | Bentuk-bentuk utama |
|-----------------------------|---|--|---|
| Evaluasi semu | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid tentang hasil kebijakan | Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial | Eksperimentasi sosial Akuntansi system sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktik |
| Evaluasi Formal | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal di umumkan sebagai tujuan program-kebijakan | Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi di umumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai | Evaluasi perkembangan Evaluasi eksperimen Evaluasi proses retrospektif Evaluasi hasil retrospektif |
| Evaluasi keputusan teoritis | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan | Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal atau diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. | Penilaian tentang dapat atau tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multi atribut |

(Sumber: *Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 612*)

Merujuk pada konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan **Teori Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn** yang memiliki enam kriteria dalam evaluasi kebijakan yang diantaranya adalah efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat

Munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dunianya sendiri. Sehingga pada prinsipnya konsep pemberdayaan muncul dalam rangka membangkitkan atau membangun potensi-potensi yang ada pada seseorang dan atau sekelompok orang seperti : bakat, keterampilan, kekuatan, dan kesenangan. Clutterburg (2003) dalam Makmur (2008:54) menjelaskan sebagai berikut :

“Mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan organisasi.”

Pemikiran Clutterburg tersebut menunjukkan bahwa makna pemberdayaan itu tidak hanya diartikan secara ekonomi, dimana individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi menyangkut kepercayaan diri setiap individu, harga dirinya, dan nilai-nilai budaya organisasi yang harus ditempatkan secara seimbang hingga setiap manusia benar-benar menemukan jati diri yang sebenarnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, menurut Puji Hardiyanti dalam jurnal kemiskinan dan upaya pemberdayaan masyarakat (2006) konsep pemberdayaan harus ditempatkan tidak hanya secara individual, tetapi secara kolektif, dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Hal ini menempatkan konsep pemberdayaan sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata

dunia didalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Seiring dengan adanya reformasi maka istilah pemberdayaan masyarakat seringkali mengiringi. Arti dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri menurut Sumaryo (1991) adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri. Senada dengan itu Margono (*Op.Cit:38*) mengemukakan “pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa hingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan bahwa perkembangan itu adalah hasil kekuatan eksternal, masyarakat harus dijadikan subjek bukan objek”. Vidhyandika Moeljarto dalam (<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-masyarakat-dan-pembangunan-berkelanjutan.html>) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat banyak ditentukan oleh akses dan kontrol yang dimiliki subyek pembangunan itu pada berbagai sumber daya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta

berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *Sustainable Development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai garbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, social, dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, social, dan ekologinya. Tanpa mengesalkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin.

Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*) terkadang sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*Community Development*) karena prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan, dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Cook (1994) (*Ibid*) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *Community Development* dan *Community Empowerment*, secara sederhana Subejo dan Supriyanto (2004) (*Ibid*) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective*

action dan *networking*, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Dengan kata lain melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat bisa lebih mandiri dan terampil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki melalui kerjasama dan kegiatan antar kelompok. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strateginya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait dan terlibat (instansi pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, swasta, dan pihak lainnya) serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

2.1.6 Deskripsi PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurut Tim Pengendali PNPM Mandiri (2007:11), pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri (*Ibid*)

adalah:

1. Tujuan Umum
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
 - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan akuntabel.
 - c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor*)
 - d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
 - e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
 - f. Meningkatnya modal social masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program (*Op. Cit: 16-17*) sebagai berikut :

- a. Pengembangan Masyarakat

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

- b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

- c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku local/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

- d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

Ruang lingkup program PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat yang meliputi (*Op. Cit.* 17):

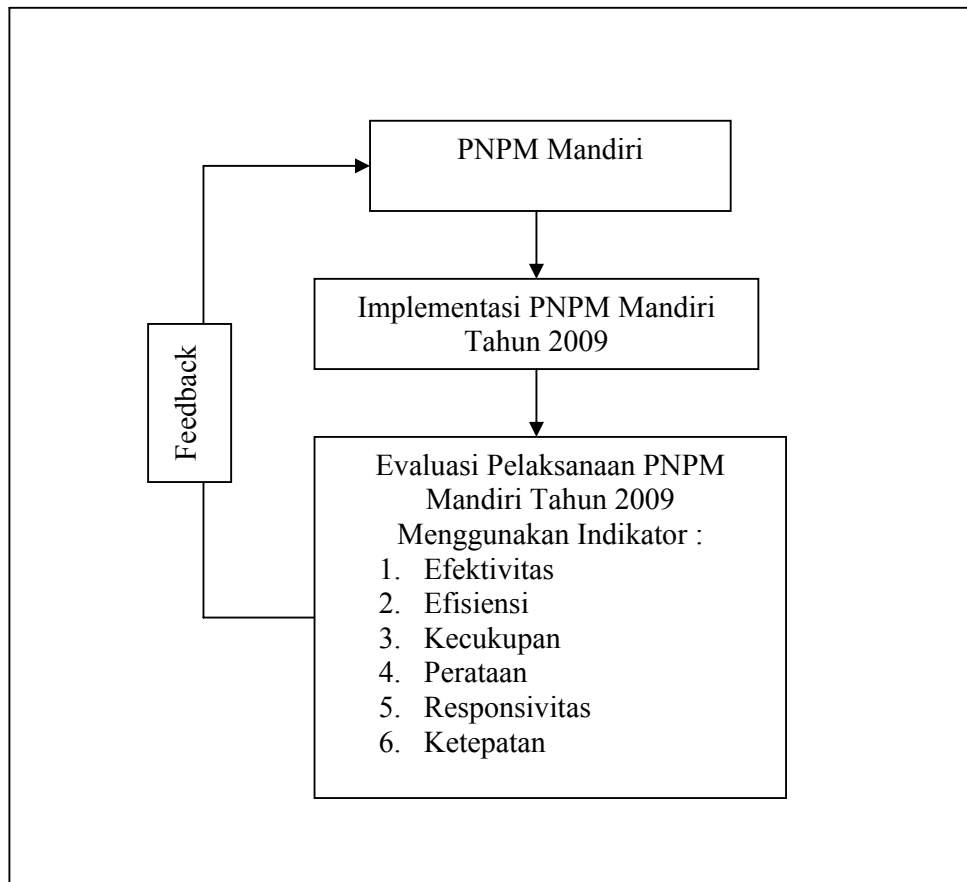
- a. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin terutama kaum perempuan. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini.
- c. kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup kegiatan program ini terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs. Komponen program PNPM Mandiri pada dasarnya memberikan bantuan kepada dua kelompok sasaran utama program PNPM Mandiri yaitu masyarakat dan pemerintah daerah serta stakeholder yang ada di daerah program PNPM Mandiri dilaksanakan.

2.1. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan tahun 2009. PNPM Mandiri merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk mencari solusi terbaik dalam mengentaskan kemiskinan di daerah mereka. Dalam pelaksanaan program tersebut dikenal tiga aspek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program tersebut yaitu aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Dari pelaksanaan ketiga aspek tersebut dapat dilihat tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dari program tersebut. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut dengan menggunakan teori William N. Dunn yang terdiri dari enam indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kemudian hasil evaluasi tersebut akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan tahun 2009. Bila digambarkan maka kerangka berpikir peneliti adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Berpikir



2.2. Asumsi Dasar

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan Tahun 2009 belum berjalan dengan baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode atau cara yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di kelurahan tersebut. Metode ini juga merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari suatu penelitian. Selain itu metode deskriptif ini juga bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai ”prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Jadi menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Denzin dan Lincoln (1987) (*Op.Cit: 5*), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Data yang terkumpul pada pendekatan kualitatif bukan berupa angka-angka, melainkan berupa gambar dan atau berbentuk kata-kata. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome* dan juga makna dibalik data yang diamati. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti juga ikut berpartisipasi di lapangan, mengamati serta mencatat apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai data maupun dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

3.2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam penelitian dan bertujuan untuk mengukur suatu gejala dalam penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian mengenai Evaluasi PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan yaitu peneliti sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti sebagai instrumen penelitian juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian dan terjun ke lapangan. Validasi peneliti tersebut meliputi validasi terhadap pemahaman mengenai metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap apa yang akan diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, dan keahlian peneliti dalam mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Menurut Moh. Pabundu (2006:57) data primer adalah data

yang diperoleh dari informan atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian merupakan data berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder (*Op. Cit.*: 64) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti, biasanya berupa foto-foto, dokumen-dokumen atau gambar-gambar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

1. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong (2005:126) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Menurut Creswell (2010:267) observasi dalam penelitian kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi/ pengamatan seperti yang dikemukakan Guba dan Lincoln dalam Moleong (2005:126) yang diantaranya adalah sebagai berikut :

“Pertama, teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung. *Kedua*, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. *Ketiga*, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. *Keempat*, sering terjadi ada keraguan pada peneliti,

jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang bias. *Kelima*, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus. *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.”

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi berperan serta (*participant observation*), dimana peneliti berperan sebagai pengamat yang mengamati secara langsung pelaksanaan PNPM Mandiri di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian serta mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui peneliti tentang objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara juga digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta hal-hal yang lebih mendalam dari informan mengenai penelitian yang dilakukan. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in-depth interview*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur secara mendalam kepada beberapa informan sampai titik jenuh untuk menemukan permasalahan atau gejala-gejala yang terjadi pada pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan. Wawancara tidak terstruktur ini mirip dengan percakapan informal. Metode wawancara ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan. Wawancara tidak terstruktur bersifat

luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

3. Studi Literatur atau Kepustakaan

Studi literatur atau kepustakaan merupakan bentuk pengumpulan data dari berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian, baik yang berupa teks book, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Studi kepustakaan juga berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan objek penelitian.

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, (1981:65) dalam Moleong (2006:132) pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi informan berperan sebagai *sampling internal* karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Penentuan informan dalam penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan Tahun 2009, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) yang merupakan

metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang pelaksanaan PNPM Mandiri di lokasi penelitian, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (I₁). Beliau adalah Korkot Kota Tangerang
- b. Bapak Udin Wahyudin, ST (I₂). Beliau adalah Fasilitator Teknik Kelurahan Peninggilan.
- c. Bapak Anwar Rasyidi (I₃). Beliau adalah Koordnator BKM Amanah periode 2007-2011.
- d. Bapak Mursalih (I₄). Beliau adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Amanah Kelurahan Peninggilan
- e. Bapak Mahmudin, S.Ip (I₅). Beliau adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Sejahtera
- f. Bapak Dani, Spd (I₆). Beliau adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Makmur.
- g. Bapak Heriyanto (I₇). Beliau adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Usaha Bersama.
- h. Bapak Mulyadi (I₈). Beliau adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Seroja.

- i. Bapak Djumeno (I₉). Beliau adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Basma.
- j. Bapak H. Mursidi (I₁₀). Beliau adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Umat I.
- k. Bapak Muhasan (I₁₁). Beliau adalah ketua KSM Bina Umat II
- l. Ibu Nuraini (I₁₂). Beliau adalah Masyarakat Penerima Manfaat PNPM Mandiri.
- m. Bapak Indra Gunadi (I₁₃). Beliau adalah Anggota KSM Bina Umat II
- n. Ibu Sri Darmasih (I₁₄). Beliau adalah Masyarakat Penerima Manfaat PNPM Mandiri.
- o. Bapak Sumardi (I₁₅). Beliau adalah Masyarakat Penerima Manfaat PNPM Mandiri
- p. Bapak Ijih Tarmiji (I₁₆). Beliau adalah Masyarakat Penerima manfaat PNPM Mandiri
- q. Bapak Basri (I₁₇). Beliau adalah Masyarakat Penerima manfaat PNPM Mandiri.
- r. Bapak Rohim A. (I₁₈). Beliau adalah Ketua KSM Barokah
- s. Ibu Rodiah (I₁₉). Beliau adalah Masyarakat Penerima manfaat PNPM Mandiri.

3.4. Teknik Analisis Data

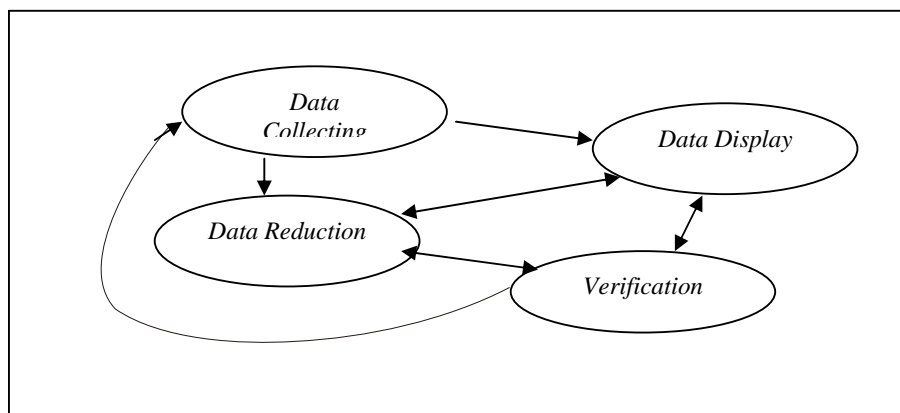
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2005:248) analisis data kualitatif adalah:

”upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Menurutnya, analisis data terdiri atas tiga subbab yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/ verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, sewaktu poses pengumpulan data sementara dan analisis awal, serta setelah tahap pengumpulan data berakhir.

Apabila digambarkan, model analisis data menurut Miles& Huberman adalah sebagai berikut:



Gambar 2

Analisis data menurut Miles & Huberman

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Jadi mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga nantinya akan didapat gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya perangkuman data (*data summary*), pengodean (*coding*), merumuskan tema-tema, pengelompokan (*clustering*), dan penyajian cerita secara tertulis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data didefinisikan sebagai konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur (*structured summaries*) dan sinopsis (Fischer&Wertz, 1975), deskripsi singkat (*vignettes*)(Erikson, 1986), diagram-diagram (Carney, 1990; Gladwin, 1989; Strauss, 1987; Werner&Schoeple, 1987a,1987b), matriks dengan teks daripada angka dalam sel (Eisenhardt, 1989a; Miles&Huberman, 1984, 1994). Jadi, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi pada penelitian yang dilakukan.

3. Tahap Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi (*Verification*)

Tahap pengambilan kesimpulan atau verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi; penetapan makna dari data yang tersaji. Sehingga setelah data tersebut didisplay atau disajikan maka dapat ditarik kesimpulan sementara yang akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya.

3.5. Pengujian Validitas Dan Reabilitas Data

Pengujian validitas dan reabilitas data dalam penelitian kualitatif berguna untuk memastikan instrumen yang digunakan dalam penelitian tepat dan juga untuk mengetahui hasil yang dicapai dari setiap informan sama. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal yang berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, dan validitas eksternal yang berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana informan tersebut diambil.

Sedangkan reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas berkenaan dengan konsistensi data, di mana bila terdapat peneliti yang

melakukan penelitian pada obyek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (*social situation*) bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu triangulasi dan *membercheck*.

1. Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Denzin (2009:605) istilah triangulasi juga bisa berarti konvergensi antarpeleliti (penyatuan catatan lapangan satu peneliti dengan hasil observasi peneliti lain) sekaligus konvergensi antara berbagai teori yang digunakan. Denzin (2009:271) merangkum lima tipe dasar dari teknik triangulasi, sebagai berikut:

1. Triangulasi data (*Data triangulation*), yaitu menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian.
2. Triangulasi peneliti (*Investigator triangulation*), yaitu menggunakan sejumlah peneliti atau evaluator.
3. Triangulasi teori (*Theory triangulation*), yaitu menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal.
4. Triangulasi metodologis (*Methodological triangulation*), yaitu menggunakan beragam metode untuk mengkaji problem tunggal
5. Triangulasi interdisipliner (*Interdisciplinary triangulation*), yaitu dengan memanfaatkan lintas disiplin keilmuan ke dalam proses-proses penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Bungin Burhan (2007:204) mengatakan bahwa proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan.

2. *Membercheck*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.

4.1.1. Deskripsi Wilayah Kelurahan Peninggilan

Kelurahan Peninggilan merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Ciledug yang terletak di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Luas wilayah Kelurahan Peninggilan adalah 120,22 Ha. Jumlah penduduk keseluruhan tahun 2009 sejumlah 13.071 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6490 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6581 jiwa. Secara geografis batas wilayah Kelurahan Peninggilan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Peninggilan Utara
- b. Batas Selatan : Kelurahan Pondok Aren
- c. Batas Barat : Kelurahan Parung Serab
- d. Batas Timur : Kelurahan Larangan Selatan

Sumber daya yang dimiliki kelurahan Peninggilan di bidang sosial berupa kesehatan, pendidikan, dan sarana ibadah. Rinciannya sebagai berikut :

Bidang kesehatan

- a. Posyandu : 12 unit
- b. Apotek : 1 unit
- c. Pengobatan alternative : 2 unit

Bidang Pendidikan:

- a. TK : 3 unit
- b. SD : 4 unit
- c. Yayasan Pendidikan : 1 unit
- d. Madrasah : 1 unit

Sarana ibadah :

- a. Masjid : 5 unit
- b. Mushola : 7 unit

Masyarakat Kelurahan Peninggilan sebagian besar bekerja sebagai pedagang, hal ini disebabkan karena lokasi Kelurahan Peninggilan yang dekat dengan pasar. Sebanyak 1.177 jiwa berprofesi sebagai pedagang, 1.118 jiwa sebagai buruh, 767 jiwa sebagai karyawan swasta, 225 sebagai Pegawai Negeri Sipil, 51 TNI berprofesi sebagai TNI, dan yang berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 10 jiwa.

4.1.2. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelurahan Paninggilan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat miskin agar mampu berusaha dan memberdayakan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri menempatkan peran serta masyarakat sebagai komponen utama, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di kelurahan Peninggilan dimulai pada tahun 2009 dan telah mencakup 20 RT dan 12 RW. PNPM mandiri di kelurahan Peninggilan merupakan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang pelaksanaannya kurang berhasil. Dengan adanya PNPM mandiri di kelurahan Peninggilan, diharapkan masyarakat Peninggilan bisa lebih mandiri serta bisa menumbuhkan rasa kepercayaan pada diri masyarakat untuk berdaya pikir dalam memanfaatkan dana BLM yang diberikan untuk memperbaiki hidupnya secara optimal.

Pada tahun 2009 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Kelurahan Peninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar dua ratus juta rupiah. Dana BLM tersebut turun berdasarkan usulan kegiatan masyarakat yang sudah diskala prioritas atau istilah lainnya disebut dengan Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK). Melalui proses penentuan prioritas tersebut diperoleh kesepakatan agar keseluruhan dari dana tersebut digunakan untuk kegiatan infrastruktur. Berdasarkan *Best Practice* BKM Amanah Kelurahan Peninggilan Tahun 2009, pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk kegiatan infrastruktur sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan untuk Biaya Operasional Prosedur (BOP) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta

lima ratus ribu rupiah). Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat Peninggilan yang di wilayahnya masih terdapat jalan-jalan yang rusak, saluran air yang kurang baik atau rumah tidak layak huni dan mampu untuk berswadaya agar kegiatan yang dilakukan di lingkungannya nanti akan berjalan dengan baik.

Dana tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk bidang ekonomi bergulir dan sosial, namun khusus untuk tahun 2009 dua kegiatan tersebut ditiadakan karena pada tahun 2009 lembaga pading PNPM Mandiri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 lembaga pading dari PNPM Mandiri adalah IDB (*Islamic Development Bank*). IDB memiliki kiblat yang berbeda dengan lembaga pading sebelumnya karena pada prinsipnya IDB hanya mengkhususkan dananya untuk kegiatan infrastruktur saja, sedangkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi harus dari DDUB (Dana Dampungan Urusan Bersama). Selain itu berdasarkan pengalaman ekonomi yang kurang baik pada tahun 2000 jadi pada periode tahun 2009 ini khusus untuk kegiatan ekonomi bergulir dan sosial ditiadakan. Hal ini juga disebabkan karena permintaan dari pemerintah kota Tangerang untuk meniadakan program ekonomi bergulir tahun 2009 dan memfokuskan pada kegiatan infrastruktur sampai BKM dan masyarakat benar-benar siap dalam menjalankan program ekonomi bergulir.

Dalam kegiatan infrastruktur ini, BKM memiliki tiga kegiatan yaitu pembangunan paving blok, perbaikan saluran air, dan perbaikan rumah tidak layak huni.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.

Pembahasan hasil penelitian adalah isi dari hasil analisis data serta fakta yang peneliti temukan di lapangan yang kemudian disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pada penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Peninggilan peneliti membatasi objek penelitian hanya pada evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri pada program infrastruktur saja. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan memfokuskan kegiatannya pada pembangunan infrastruktur saja. Hal ini sesuai dengan permintaan dari pemerintah Kota Tangerang untuk meniadakan program lain sampai masyarakat benar-benar siap.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada informan penelitian yang mengerti tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu program dari PNPM Mandiri itu sendiri. Adapun pembahasan dari hasil penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

4.2.1. Efektivitas

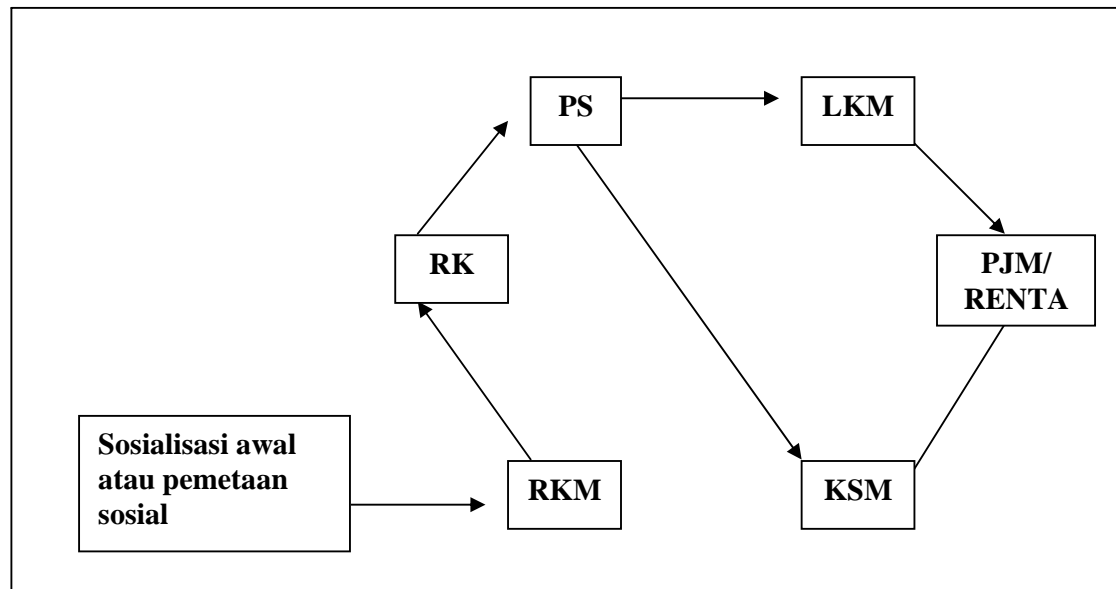
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan kata lain indikator ini menyatakan bahwa suatu program kebijakan dikatakan berhasil bila

hasil yang dicapai sesuai dan berguna dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Inti dari kegiatan PNPM Mandiri di masyarakat kelurahan adalah proses menumbuh kembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui proses pembelajaran dan pelebagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (*value based development*), prinsip-prinsip universal kemasyarakatan, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus Rembug Kesiapan Masyarakat dan kerelawanan (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS), pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), perencanaan partisipatif menyusun Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) berorientasi kinerja peningkatan IPM-MDGs dan Rencana Tahunannya (Renta), serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Gambaran umum mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut :

Gambar 3

Siklus Pelaksanaan PNPM Mandiri di Masyarakat



Bapak Udin Wahyudin, ST (45th) juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri ada yang dikenal dengan sebutan siklus. Siklus tersebut di mulai dari tahap RKM sampai terbentuknya kelembagaan BKM. Berikut pernyataannya¹:

“Di PNPM itu kan ada siklus, siklus itu putaran mulai dari tahap RKM awalnya. Rembug Kesiapan Masyarakat. Bagaimana masyarakat sudah siap betul, mau ga’ nerima program, ketika mau menerima program mau ga’ melakukan, mau ga’, gitu kan. Kalau mau, OK harus terbentuklah relawan-relawan atau kader masyarakat karena kepanjang tangan dari fasilitator kepada masyarakat, yang tau apa itu masyarakat, yang tau kondisi masyarakat, seperti itu kan. Baik itu dilihat dari segi sosial, baik itu dilihat dari segi apa segala macam, dari segi infrastruktur. Nah setelah adanya rembug kesiapan masyarakat RKM itu kan, langsung melangkah melangkah lagi kepada apa namanya Refleksi Kemiskinan (RK). Bagaimana kondisi masyarakat saat ini gitu kan. Dari tahun 2000 sampai sekarang itu ada perubahan ga’ baik itu data miskinnya, baik itu data infrastrukturnya, baik itu data sosialnya, maupun data ekonominya masih

¹ Wawancara dengan Fasilitator Teknik Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Jumat, 8 April 2011

tetap datanya yang lama atau dah berubah orang miskin di daerah mereka.”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri terdapat beberapa siklus yang dimulai dari tahapan RKM. Pada tahapan ini kesediaan dan kesiapan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri dipertanyakan. Apabila masyarakat siap dan mau melaksanakan kegiatan PNPM maka dibentuklah relawan-relawan yang mengerti kondisi lingkungan kelurahan Peninggilan yang juga merupakan kepanjangan dari fasilitator kelurahan yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM mandiri di kelurahan Peninggilan.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Anwar Rasyidi (54th) yang menyatakan² :

“...Awal daripada pelaksanaan kita mengumpulkan warga melalui RT RW, musyawarah dengan warga, kemudian melihat laporan atau kehendak masyarakat tentang lokasi-lokasi yang memerlukan untuk pembangunannya. Ketika sudah terkumpul warga, musyawarah, kemudian kita bersepakat untuk mengajukan proposal melalui BKM Amanah ke PNPM atau ke tingkat kota.”

Jadi berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis ketika PNPM Mandiri akan di perkenalkan di suatu wilayah, maka hal pertama yang dilakukan yaitu mengadakan Rembug Kesiapan Warga (RKM), untuk menanyakan kepada masyarakat apakah mereka mau menerima PNPM di daerahnya atau tidak. Jika masyarakat setuju, maka mulailah dilakukan refleksi kemiskinan oleh para relawan-relawan dan atau kader-kader dari masyarakat untuk melihat kondisi masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun

² Wawancara dengan Koordinator BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Rabu, 13 April 2011

infrastruktur di lingkungan mereka. Setelah melakukan refleksi kemiskinan maka mulailah terbentuk yang namanya lembaga BKM dan dimulailah penyusunan PJM Pronangkis untuk perencanaan pelaksanaan PNPM Mandiri di lingkungan mereka. Setelah itu barulah PNPM bisa mulai di laksanakan di daerah mereka.

Ukuran daripada efektivitas terlihat dari adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi dari para pemangku kebijakan terkait. Untuk pendampingan yang dilakukan di Kelurahan Peninggilan pada tahun 2009 sudah berjalan dengan baik, tingkat partisipasi masyarakat di wilayah ini juga sangat tinggi. Bapak Dr. (c) Yumhi, ST, MM (29th) menyatakan³ :

“Ya sejauh ini yang dilakukan di pendampingan PNPM Mandiri cukup baik. Tahun 2009 itu dana yang kita lepaskan itu secara global seratus persen sudah terserap di masyarakat dan ada audit yang dilaporkan tidak terdapat temuan yang signifikan.”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa dari sisi indikator capaian program dan tingkat partisipasi masyarakat pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri bisa dikatakan telah berjalan dengan baik. Kelembagaan BKM Amanah kelurahan Peninggilan pun bisa dikatakan baik pula. Terlihat dengan adanya struktur organisasi dari BKM itu sendiri, visi-misi dan program kerja yang tertuang dalam PJM Pronangkis BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, serta kerja sama dari para pengurus BKM Amanah dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th)⁴ :

³ Wawancara dengan Korkot Kota Tangerang, Tangerang, Kamis, 31 Maret 2011

⁴ *Ibid*

“Ya saya kira sejauh ini memang berdasarkan siklus yang ada ya. Siklus program dari sisi kelembagaan BKM nya sudah cukup baik ya. Tingkat partisipasi anggotanya juga sudah bagus. Kemudian visi misi sudah ada. Program kerja juga sudah ada.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dari sisi kelembagaan BKM amanah Kelurahan Peninggilan bisa dikatakan sudah baik. Terlihat dari adanya tingkat partisipasi dan kerja sama dari para stakeholder terkait seperti fasilitator kelurahan, pengurus BKM, dan para KSM, visi misi, dan program kerja yang tertuang dalam PJM pronangkis Kelurahan Peninggilan.

Pada penelitian tentang evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri kelurahan peninggilan program infrastruktur, indikator efektivitas juga berkenaan dengan pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Peniggilan. Kegiatan infrastruktur yang di prioritaskan adalah kegiatan yang secara langsung memberikan dampak atau manfaat secara kolektif bagi masyarakat dan di utamakan kegiatan yang bersifat lintas wilayah (lintas RT/RW, dan seterusnya) yang memberikan lingkup kemanfaatan lebih luas bagi masyarakat kelurahan Peninggilan. Oleh karena itu peneliti melakukan evaluasi program pembangunan infrastruktur yang di lakukan PNPM Mandiri dengan melihat apakah hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diprioritaskan dari kegiatan infrastruktur itu sendiri. Kegiatan infrastruktur yang di lakukan diantaranya yaitu bedah rumah, perbaikan saluran air, dan pembangunan paving blok.

a. Perbaikan Rumah.

Program perbaikan rumah yang dilakukan oleh PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan dilakukan pada satu unit rumah dengan luas 5,2x7,0 meter persegi

yang berlokasi di RT.01/07 kelurahan Peninggilan kecamatan ciledug kota tangerang. Awal daripada KSM Basma mengusulkan program perbaikan rumah di lingkungannya yaitu karna di dasari oleh rasa solidaritas dan kesama rataan. Masyarakat lain merasa di lingkungan tersebut masih ada saudara mereka yang keadaannya di bawah standar. Di samping itu keadaan rumah tersebut juga bisa dikatakan sudah tidak layak huni dan terkesan kumuh. Sehingga muncul kesadaran dari masyarakat sekitar terutama para anggota KSM Basma untuk mengajukan program perbaikan atau bedah rumah ke PNPM Mandiri melalui BKM Amanah kelurahan Peninggilan. Bapak Djumeno (46th) menuturkan⁵ :

“Sebelumnya dulu ya ga’ gitu. Kesannya agak kumuh. Nah kebetulan rumah itu kan apa mbak ya dasarnya kita usulkan ya karna biar keberadaan saudara kita ga terlalu di bawah standar.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa hal yang mendasari KSM Basma mengajukan program perbaikan rumah di lingkungannya yaitu karna rasa solidaritas dan peduli sesama. Selain itu, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap rumah tersebut setelah diperbaiki, keadaan rumah tersebut sudah bisa dikatakan layak huni walaupun kondisinya tidak serapih dan sebesar rumah-rumah lain yang ada di sekitarnya. Berikut penuturan Bapak Djumeno (46th)⁶:

“Ya memang tidak bisa rapi banget, paling ya mendekati layak huni lah dari sebelumnya. Kalau di rapihin seperti yang kanan kirinya mungkin ya enggak. Dua puluh juta lah mbak baru. Biar yang punya rumah nanti nerusin dikit-dikit kalo ada.”

⁵ Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

⁶ *Ibid*

Berdasarkan pernyataan diatas dan observasi yang telah peneliti lakukan peneliti menganalisis bahwa rumah yang telah diperbaiki tersebut keadaannya lebih rapi dan lebih sehat dari sebelumnya. Menurut beliau mungkin perbaikan yang dilakukan tidak begitu rapi namun bisa dikatakan layak huni dari sebelumnya. Ketika ditanyakan kepada masyarakat yang memperoleh bantuan bedah rumah dari PNPM Mandiri tersebut berikut penuturan Bapak Basri (49th)⁷:

“Ya saya mah senang kalo rumah ini di benerin. Alhamdulillah diperbaiki gitu ya pak ya.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Basri tersebut peneliti menganalisis bahwa beliau senang atas perbaikan yang dilakukan terhadap rumahnya. Beliau terlihat senang dan bersyukur karna rumahnya bisa diperbaiki oleh PNPM Mandiri. Bapak Basri (49th) kembali menuturkan :

“Saya gak bisa ngungkapin. Cuman hanya bisanya ya bersyukur, ya berterimakasih sama orang masyarakat sini gitu. Juga sama PNPM Mandiri.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa beliau juga berterima kasih kepada PNPM Mandiri dan masyarakat di lingkungannya yang telah bergotong royong memperbaiki rumahnya yang terlihat lebih rapi dan layak huni dari sebelumnya.

Selain itu Ketua KSM Basma Bapak Djumeno (46th) juga menuturkan hal yang sama. Berikut penuturannya⁸:

“Ya alhamdulillah rumah jadi rapi mungkin sehat ya bu ya. Bersih, sehat. Sebelumnya dulu ya ga’ gitu. Kesannya agak kumuh. Nah kebetulan rumah itu kan apa mbak ya dasarnya kita usulkan ya karna biar

⁷Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

⁸Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

keberadaan saudara kita ga terlalu di bawah standar, supaya anulah. Karna dapat dana jadi ya udah kita ambil saja. Yang lain ga' ada yang sanggup, tap RW. 07 sanggup. Dana cuma delapan juta bayangin bangun rumah coba. Bagus. Ya memang tidak bisa rapi banget, paling ya mendekati layak huni lah dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi dan kutipan hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa beliau merasa puas dan senang karna program perbaikan rumah yang di lakukan di lingkungannya sesuai dengan yang di ajukan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Selain itu peneliti juga menganalisis bahwa setelah diperbaiki rumah tersebut menjadi lebih rapi dan sehat dari sebelumnya walaupun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bentuk fisik dari rumah tersebut tidak sama atau tidak sebesar rumah-rumah lain disekitarnya.

Maka dari itu berdasarkan kutipan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan peneliti menganalisis bahwa program perbaikan rumah yang dilakukan PNPM Mandiri sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan tersebut.

b. Perbaikan Saluran Air

Program infrastruktur kedua yang dilakukan PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan pada tahun 2009 yaitu perbaikan saluran air.

Tabel 6

Perbaikan saluran air BKM Amanah tahun 2009

| Nama KSM | Lokasi | Volume |
|-----------------|---------------|--------------------|
| Bina Umat II | RT. 02/ 09 | 134 m ² |
| Seroja | RT. 01/ 07 | 130 m ² |

Perbaikan saluran air yang dilakukan PNPM mandiri tahun 2009 dilakukan di lingkungan KSM Bina Umat II dan KSM Seroja dengan volume dan lokasi yang berbeda satu dengan lainnya. Perbaikan saluran air ini dilakukan untuk mencegah terjadinya genangan air yang diakibatkan oleh meluapnya air buangan masyarakat sekitar dan ketidakmampuan parit-parit yang ada di lingkungan tersebut untuk menampung air buangan warga tersebut. Dengan adanya perbaikan saluran air ini di harapkan pembuangan air atau limbah rumah tangga dari masyarakat lingkungan tersebut bisa mengalir ke satu titik dan tidak akan menyebabkan genangan air lagi.

Latar belakang dua KSM ini mengajukan perbaikan saluran air di lingkungannya tidak lain ialah agar saluran air di lingkungannya bisa lebih rapi dan teratur. Bapak Mulyadi (28th) menuturkan⁹ :

“Memang kebetulan saluran airnya acak-acakanlah gak teratur ya istilahnya. Ya memang dimanfaatkan supaya bisa teratur, rapi, bersih, kan gitu.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dengan diperbaikinya saluran air ini maka air buangan atau limbah rumah tangga bisa mengalir di satu titik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungannya. Selain itu dengan di perbaikinya saluran air itu maka tidak akan ada lagi genangan-genangan air yang terjadi dan secara tidak langsung lingkungan mereka pun terlihat lebih rapi dan bersih. Bapak Mulyadi (28th) kembali menuturkan¹⁰ :

“Karna banyak orang manfaatin. Yang tadinya pada mau bikin apa yang orang betawi itu apa ya namanya empang. Yang tadinya banyak empangan ya akhirnya pada nyalur di got.”

⁹ Wawancara dengan Ketua KSM Setoja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

¹⁰ *Ibid*

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa dengan adanya manfaat yang dirasakan dari perbaikan saluran air ini bisa menghindari pembangunan atau pembuatan hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh masyarakat lainnya sehingga membuat lingkungan ini menjadi lebih rapi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Sri (50th). Berikut pernyataan beliau¹¹:

“Ya alhamdulillah saluran airnya jadi rapi ya mbak. Jadinya airnya gak ngalir kemana-mana.”

Berdasarkan kutipan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan peneliti menganalisis bahwa kondisi saluran air di lingkungan KSM Seroja menjadi lebih rapi dan tidak ada air yang tergenang di lingkungan KSM tersebut. Hal ini berarti perbaikan saluran air di lingkungan KSM Seroja telah berguna bagi masyarakatnya.

Berbeda halnya dengan KSM Bina Umat II, perbaikan saluran air di lingkungan KSM Bina Umat II dilakukan dengan merubah total saluran air yang ada di lingkungan tersebut. Bapak Muhasan (45th) menuturkan¹² :

“.....yang namanya saluran air ini kan bukannya saluran air buka baru. Udah ada jadi bukan di perbaiki malah dirubah total. Maksudnya gak ada karena kalo mau saluran air yang buka baru ibarat kata kan belum ada salurannya dari rumah tangga, air-air rumah tangga kan belum ada kalo baru.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa perubahan total pada saluran air di lingkungan tersebut dilakukan karna masyarakat di lingkungan tersebut merasa saluran air di lingkungannya berantakan dan perlu

¹¹ Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Sabtu, 23 April 2011

¹² Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat II, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

dirubah total untuk memperbaikinya. Pada kutipan wawancara tersebut peneliti juga menganalisis bahwa terdapat bermacam-macam cara yang dilakukan para KSM dalam membenahi lingkungannya. Terlihat dari KSM Bina Umat II yang merubah total saluran airnya dikarenakan belum adanya saluran pembuangan limbah rumah tangga dari masyarakat sekitar lingkungan tersebut. Pernyataan yang hampir sama juga dinyatakan oleh Bapak Indra Gunadi (25th) yang menuturkan¹³ :

“ ...kalo saluran air ini kita buka baru nantinya bakalan lama mbak.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa pada pelaksanaan kegiatan infrastruktur PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan tahun 2009 KSM Bina Umat II merubah total saluran airnya karna apabila masyarakat membuka atau membuat saluran air yang baru maka saluran air yang baru tersebut belum ada saluran dari rumah tangga yang ada di sekitar lingkungan tersebut sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyambungkan saluran air yang baru tersebut ke saluran rumah tangga yang ada di lingkungan tersebut.

Perbaikan yang dilakukan di dua KSM tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Ketua KSM Bina Umat II dan Seroja merasa senang dan bersyukur atas perbaikan saluran air yang ada di lingkungannya. Bapak Muhasan (45th) menuturkan¹⁴ :

“Oh sudah. Alhamdulillah sudah. Istilahnya kalau dulu kan cuma hanya saluran air swadaya masyarakat. Kan tahu sendiri yang namanya

¹³ Wawancara dengan anggota KSM Bina Umat II, Tangerang, Sabtu, 23 April 2011

¹⁴ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat II, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

swadaya segala macam kita juga. Berapa senti sih gitu. Kan kalo sekarang alhamdulillah.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dengan adanya perbaikan saluran air di lingkungan KSM Bina Umat II, saluran air yang ada di lingkungan tersebut bisa lebih rapi dan lebih panjang dari sebelumnya.

Hal ini juga dirasakan oleh Ketua KSM Seroja yang merasa senang atas perbaikan saluran air yang ada di lingkungannya. Berikut penuturan Bapak Mulyadi (28th)¹⁵ :

“Ya menurut saya sih bagus. Buktinya sekarang dengan adanya saluran air kan semua bisa terarah. Tidak lari kemana-mana, terus lokasi lingkungan juga jadi bersih. Yang tadinya airnya genang sekarang udah lancar di satu titik..”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dengan adanya perbaikan saluran air yang dilakukan di lingkungan tersebut maka secara tidak langsung mereka telah menciptakan hidup sehat di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan adanya perbaikan saluran air di lingkungan KSM Seroja pembuangan air atau limbah rumah tangga bisa lebih terarah dan mengalir ke satu titik. Karna semakin sedikit air yang tergenang semakin sedikit pula kuman-kuman dan penyakit yang ada di lingkungan tersebut. Dengan kata lain perbaikan saluran air yang dilakukan di kedua KSM tersebut bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakat sekitar dengan bebas penyakit.

¹⁵ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

c. Pembangunan Paving Blok

Pembangunan paving blok yang dilakukan PNPM mandiri kelurahan Peninggilan dilakukan pada delapan KSM dengan volume dan lokasi yang berbeda-beda.

Tabel 7

Pembangunan Paving Blok BKM Amanah tahun 2009

| Nama KSM | Lokasi | Volume |
|-----------------|---------------|----------------------|
| Sejati | RT. 01/ 04 | 100 m ² |
| Barokah | RT. 02/ 11 | 205 m ² |
| Bina Sejahtera | RT. 01/ 13 | 167 m ² |
| Bina Umat I | RT. 01/ 01 | 149,2 m ² |
| Hasanah | RT. 01/ 07 | 170 m ² |
| Berhasil | RT. 02/ 04 | 65 m ² |
| Usaha Bersama | RT. 01/ 11 | 144,5 m ² |
| Makmur | RT. 02/ 13 | 213m ² |

Pembangunan paving blok yang dilakukan PNPM mandiri kelurahan Peninggilan dimaksudkan agar jalan-jalan yang ada di kelurahan Peninggilan terlihat lebih rapi dan tidak rusak. Selain itu pembangunan paving blok ini juga dimaksudkan agar satu lingkungan dengan lingkungan lainnya bisa saling terhubung sehingga menciptakan lingkup yang lebih luas bagi masyarakat kelurahan Peninggilan. Rata-rata lebar dari masing-masing paving blok ialah satu meter.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, pembangunan paving blok yang dilakukan di kelurahan Peninggilan sudah bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kelurahan Peninggilan terlebih dalam hal transportasi. Ketua KSM Bina Sejahtera juga mengaku ikut merasakan manfaat dari program infrastruktur yang dilakukan PNPM Mandiri, terutama

dalam hal transportasi karena manfaat pembangunan paving blok tersebut bisa memberikan kelancaran dalam transportasi di lingkungannya. Dari awalnya yang tidak bisa dilalui kendaraan saat hujan, setelah dilakukan pembangunan paving blok transportasi sudah bisa lewat di daerahnya ketika hujan. Berikut pernyataan Bapak Mahmudin, S.IP (32th)¹⁶:

“Walaupun selama ini mungkin gak masuk motor karna becek, jalan dibel. Sekarang kan dah bisa nyambung antara sini dengan sini. Lebih gampang lah. Otomatis lebih enak.”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dengan dibangunnya paving blok di lingkungan KSM Bina Sejahtera maka transportasi bisa lebih lancar dibanding sebelumnya. Jalan yang tadinya becek dan tidak bisa dilalui motor ketika hujan, kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Dengan begitu masyarakat merasa bersyukur dan juga merasa lebih nyaman dan senang tinggal di lingkungan tersebut. Bapak Mahmudin, S.IP (32th) menyampaikan¹⁷:

“Ya walaupun belum semua ya tapi saya melihat ternyata masyarakat sangat bersyukur sekali. Kalau dulu kan kita kerja sama nyari batu-batu kemudian kita rapihin jalan. Ternyata kan dengan adanya KSM tadi, BKM tadi sangat membantu.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dengan dibangunnya paving blok di lingkungan KSM Bina Sejahtera dan dengan adanya KSM, BKM dan masyarakat sangat membantu kelancaran pelaksanaan program infrastruktur di lingkungan KSM Bina Sejahtera.

¹⁶ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Sejahtera, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

¹⁷ *Ibid*

Manfaat pembangunan paving blok yang dilakukan oleh PNPM Mandiri juga amat dirasakan oleh masyarakat yang rumahnya dilewati oleh pembangunan paving blok. Berikut pernyataan Bapak Heriyanto (28th)¹⁸ :

“Tanggapannya bagus. Semuanya senang semuanya. Nah terutama yang depan rumahnya nih. Jadi kalau biasanya lewat itu becek atau apa apa ya itu jadinya bagus.”

Dari kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa terdapat tanggapan positif dari masyarakat tentang pembangunan paving blok yang dilakukan. Selain itu, program pembangunan paving blok yang dilakukan di kelurahan Peninggilan juga sudah bisa memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat lain. Bapak Dani, S.Pd (42th) menyatakan¹⁹:

“Udah ya. Terutama orang yang berdekatan langsung dengan jalan tersebut. Bahkan dari warga komplek pondok lakah permai juga kalau ke atas lewat sini. Lebih mudah memang. Kalau dulu kan mereka berputar ke japos dulu sana. Sekarang kan bisa tembus sana”.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa pembangunan paving blok yang dilakukan di lingkungan KSM Makmur sudah bisa di rasakan oleh seluruh masyarakat di lingkungannya. Bahkan warga dari lingkungan lainpun ikut merasakan manfaat pembangunan tersebut. Dengan dibangunnya paving blok di lingkungan KSM Makmur terlihat adanya manfaat kolektif yang dirasakan oleh semua masyarakat, baik masyarakat lingkungan tersebut maupun masyarakat dari lingkungan lain.

¹⁸ Wawancara dengan Ketua KSM Usaha Bersama, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

¹⁹ Wawancara dengan Ketua KSM Makmur, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

Hal ini dinyatakan pula oleh bapak Mardi (49th). Berikut pernyataan beliau²⁰ :

“alhamdulillah mbak. Dengan adanya paving blok ini jalan sini sama jalan yang atas bisa tersambung lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan bisa dikatakan sudah sesuai dengan kegiatan infrastruktur yang diprioritaskan.

Dari ketiga perbaikan tersebut bisa di lihat bahwa pelaksanaan program infrastruktur di Kelurahan Peninggilan sudah efektif. Hal ini senada dengan apa yang terlihat di lokasi penelitian. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan seluruh wilayah kelurahan Peninggilan yang mendapatkan BLM untuk kegiatan infrastruktur sudah tertata dengan baik dan terlihat lebih rapi sehingga lingkungan yang sebelumnya kurang rapi atau terlihat kumuh sekarang bisa terlihat bersih, rapi, dan sehat. Hampir seluruh masyarakat kelurahan Peninggilan yang lingkungannya di perbaiki merasa puas dan bersyukur atas program kegiatan infastruktur yang telah dilakukan PNPM Mandiri.

4.2.2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal pada pelaksanaan suatu

²⁰ Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Sabtu, 23 April 2011

program sehingga nantinya suatu tujuan yang di inginkan akan tercapai. Apabila sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan pada pelaksanaan kebijakan lebih besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai ini berarti pelaksanaan kebijakan tersebut tidak efisien. Pada indikator ini, efisiensi menunjukkan seberapa besar usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang di inginkan pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur oleh PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan. Artinya dalam efisiensi semua manfaat yang dirasakan atau hasil yang didapatkan sesuai dengan usaha yang dilakukan atau biaya yang di keluarkan dalam program pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri tersebut.

Biaya yang turun pada tahun 2009 sebesar dua ratus juta rupiah. Seluruh biaya tersebut di manfaatkan untuk kegiatan pembangunan fisik atau infrastruktur di lingkungan kelurahan Paninggilan. Dana tersebut di bagikan kepada sebelas KSM yang ada di kelurahan Paninggilan untuk nantinya dimanfaatkan untuk kegiatan perbaikan rumah, perbaikan saluran air dan pembangunan paving blok.

Sebelum itu di bagikan kepada sebelas KSM, tim dari BKM Amanah kelurahan Paninggilan mengadakan sosialisasi tentang kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini berdasarkan pernyataan Bapak Anwar Rasyidi (54th) mengenai usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tersebut. Beliau menyatakan bahwa²¹:

“Awal daripada pelaksanaan kita mengumpulkan warga melalui RT-RW, musyawarah dengan warga, kemudian melihat laporan atau kehendak masyarakat tentang lokasi-lokasi yang memerlukan untuk

²¹ Wawancara dengan Koordinator BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Rabu, 13 April 2011

pembangunannya. Ketika sudah terkumpul warga, musyawarah, kemudian kita bersepakat untuk mengajukan proposal melalui BKM Amanah ke PNPM atau ke tingkat kota. Terus dari pelaksanaan itu dari dua ratus juta yang turunnya bertahap itu kita bagi menjadi sebelas kegiatan, fisik semua”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa sebelum dana BLM dibagikan kepada sebelas KSM, hal pertama yang dilakukan yaitu musyawarah dengan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut mengenai pembangunan yang diperlukan di tiap-tiap lingkungan dari masyarakat tersebut untuk nantinya para KSM tersebut membuat proposal yang nantinya akan diajukan ke PNPM atau tingkat kota melalui BKM Amanah Kelurahan Peninggilan. Setelah sosialisasi dan kesepakatan dilakukan maka hal yang selanjutnya dilakukan yaitu pembentukan KSM. Untuk mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri masyarakat harus membentuk KSM terlebih dahulu. KSM merupakan pelaksana di lapangan dimana KSM bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur mulai dari tahap pengajuan proposal samapai tahap pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Bapak Anwar Rasyidi (54th) menuturkan²² :

“Tahapannya itu dengan membentuk KSM. KSM itu adalah pelaksana di lapangan. BKM Amanah itu cuma memonitor, pelaksanaannya itu KSM, KSM yang dikerjakan oleh keswadayaan masyarakat. KSM yang bertanggung jawab memerintahkan, melaksanakan, dan memelihara lahan-lahan yang kita gunakan atau tanah yang kita gunakan”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa tahapan agar setiap KSM yang ingin wilayahnya mendapat BLM untuk pembangunan infrastruktur harus melakukan pengajuan proposal. Proposal tersebut berisi

²² Wawancara dengan Koordinator BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Rabu, 13 April 2011

tentang pembangunan apa yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut, besarnya dana yang dibutuhkan, dana swadaya yang dimiliki masyarakat lingkungan yang mengajukan dan anggota KSM yang nantinya akan bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur di lingkungan tersebut, mulai dari proses pencairan dana sampai pelaksanaan program. Berdasarkan pernyataan fasilitator tehnik, dalam penyusunan proposal atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atau proposal masih ada masyarakat yang bingung dan tidak mengerti akan penyusunan proposal tersebut. Bapak Udin Wahyudin, ST (52th) mengungkapkan²³ :

“memang mereka juga kemampuannya belum maksimal. Pada tataran beberapa item, beberapa bagian itu akhirnya bahasanya seperti ini terkadang kan kita sebagai fasilitator ini fungsi kita kan sebenarnya navigator bukan operator. Paham maksud saya navigator juga. Tetapi ketika masyarakat kita belum maksimal akhirnya intervensi kita jadi operator. Tapi tidak semua kita operator. Ada beberapa bagian dari ranahnya masyarakat itu ya mereka. Karena masyarakat ini kadang-kadang juga tingkat SDMnya itu tidak merata. Tidak merata dalam arti ya ada yang rendah ada yang tinggi. Kadang-kadang yang tinggi itu juga tidak mau terlibat karena ini adalah ranahnya ranah social kan. Jadi tidak ada bidik materi yang mereka dapat secara real dari masyarakat. Jadi kadang-kadang dalam beberapa kegiatan seperti yang hal-hal teknis seperti itu ada beberapa point, ada beberapa item kita operator, tetap masyarakat ada”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa kemampuan masyarakat dan atau para KSM masih belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan PNPM di kelurahan Peninggilan sehingga menyebabkan adanya intervensi atau pemahaman yang berbeda tentang peran dari fasilitator itu sendiri. Namun berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan

²³ Wawancara dengan Fasilitator Tehnik Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Jumat 8 April 2011

pada beberapa KSM tidak terlihat adanya kebingungan para KSM dalam hal pengajuan proposal maupun pengerjaannya. Ketika ditanyai mengenai pengerjaan proposal maupun isi dari proposal itu sendiri, para KSM terlihat cukup mengerti tentang proposal atau RAB tersebut. Berikut pernyataan Bapak Mahmudin, S.IP (32th) ketika ditanyai tentang isi dari proposal atau RAB yang dia ajukan²⁴ :

“Ya itu melalui pengumpulan proposal. Melalui proposal kemudian disampaikan melalui BKM. Isinya permohonan bantuan untuk pemasangan paving blok di lingkungan RT. 01/13. Ya awalnya itu permohonan dari RT-RW setempat, melaksanakan permohonan, setelah itu kita adakan pembentukan pengurus KSM sama masyarakat sekitar, baru kita ajukan dengan proposal”.

Dari kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis tidak terlihat adanya kebingungan para KSM dalam mengajukan atau membuat proposal. Peneliti menganalisis bahwa para KSM cukup mengerti tentang proses dari pembuatan dan isi proposal itu sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Heriyanto (28th) yang juga menyatakan hal yang sama. Beliau menyatakan²⁵ :

“Oh itu awalnya memang tadinya dari BKM Amanah itu kan memang dia membuka dulu bagi wilayah kelurahan Peninggilan ini bagi yang. Ini ini bentuknya fisik ya. Bagi yang apa sarana fisiknya kurang memadai atau tidak layak itu boleh mengajukan proposal. Gitu. Saya bikin proposal kan. Saya bikin proposal, ngajuin melalui BKM amanah.”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa memang terlihat tidak adanya kebingungan dari para KSM mengenai masalah RAB atau proposal dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan.

²⁴ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Sejahtera, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

²⁵ Wawancara dengan Ketua KSM Usaha Bersama, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

Selanjutnya untuk mengukur tingkat efisiensi dari pelaksanaan PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan tahun 2009, peneliti melakukan evaluasi pada tiga program atau kegiatan infrastruktur yang dilakukan dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan para KSM dan masyarakat dalam memberdayakan sumber daya yang mereka miliki secara optimal.

a. Perbaikan Rumah

Perbaikan rumah yang dilakukan di lingkungan KSM Basma PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan menghabiskan dana sebesar sebelas juta rupiah. Dana tersebut berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan oleh PNPM Mandiri sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dana swadaya dari masyarakat lingkungan KSM Basma sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dana swadaya tersebut sebagian berasal dari kas KSM dan sebagian lagi berasal dari sumbangan warga baik berupa materil maupun non materil yang bisa mendukung kelancaran program perbaikan satu unit rumah di lingkungan mereka.

Untuk mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) para pengurus KSM Basma harus mengajukan proposal kepada BKM Amanah kelurahan Peninggilan. Proposal tersebut berisi tentang kegiatan pembangunan apa yang akan dilaksanakan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari KSM Basma untuk memperbaiki satu unit rumah, dan dana swadaya yang dimiliki KSM tersebut beserta rincian daftar swadaya yang diberikan masyarakat. Setelah diajukan permohonan dana maka mulailah kegiatan perbaikan rumah itu dilakukan.

Kegiatan perbaikan rumah yang dilakukan di lingkungan KSM Basma sudah merupakan kesepakatan antar masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga ketika pelaksanaan perbaikan rumah tersebut dilaksanakan masyarakat pun turut antusias berpartisipasi dalam perbaikan rumah tersebut. Bapak Djumeno (46th) menuturkan²⁶ :

“Kebetulan ini kan dari itu ya. Jadi awalnya ketika mendapatkan proyek ini ya kita ngajukan permohonan waktu itu ke BKM ya. Kita sosialisasikan dengan warga intinya ya gimana di lingkungan kita ini akan kita buat atau kita usulkan mengenai proyek-proyek yang kita jalankan ini. Kebetulan ya partisipasi warga mengenai masalah ya membantulah. Terutama masalah mungkin model-model apa ya kopi, kue gitu. Apalagi ketua KSM nya sayuran ada.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan program perbaikan rumah di lingkungan KSM Basma masyarakat antusias dan mendukung program ini terlihat dari bantuan konsumsi maupun tenaga yang masyarakat lingkungan tersebut berikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program perbaikan rumah di lingkungan mereka. Bapak Djumeno (46th) juga menuturkan²⁷ :

“Kebetulan kita juga disamping apa yang di arahkan dari pihak KSM juga ya bu. Ya kita bentuk panitia. Sebetulnya yang panitia itu ya orang-orang yang artinya yang tahu atau paham tentang masalah pekerjaan itu.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis selain partisipasi dari masyarakat, dalam perbaikan satu unit rumah ini dibentuk pula panitia yang bertanggung jawab atas setiap proyek yang dikerjakan. Satu panitia terdiri dari sembilan sampai sebelas orang dan memiliki tugas dan kewajiban

²⁶ Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

²⁷ *Ibid*

masing-masing. Jadi selain diarahkan oleh para pengurus BKM, di lingkungan ini juga dibentuk panitia kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran kegiatan perbaikan satu unit rumah yang ada di lingkungan tersebut. Bapak Djumeno (46th) menuturkan²⁸:

“.....walaupun kita dah bentuk panitia ya untuk apa namanya ya berpartisipasi, jadi tidak kita lepas begitu saja. Orang pas pelaksanaan kita ikut terjun. BKM juga ikut. Ya kita ga’ kerja sendiri. Ya memang kerja sama dan ikut mengarahkan. Bukan ngawasin tapi mengarahkan supaya pembangunan itu sesuai dengan apa yang di inginkan.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa walaupun telah dibentuk kepanitiaan dalam kegiatan perbaikan satu unit rumah ini para KSM yang ada tidak lepas tangan begitu saja. Mereka ikut terjun ke lapangan juga. Jadi antara pengurus KSM Basma dan panitia yang ada saling bekerja sama dan mengarahkan satu sama lain, sehingga menunjang kelancaran program ini. Hal ini juga didukung oleh pengakuan Bapak Djumeno (46th) yang mengakui kelancaran program perbaikan satu unit rumah yang dilakukan. Berikut pernyataannya²⁹ :

“Kalo masalah kayaknya ga’ ada ya. Kebetulan kita juga disamping apa yang di arahkan dari pihak KSM juga ya bu. Ya kita bentuk panitia. Sebetulnya yang panitia itu ya orang-orang yang artinya yang tahu atau paham tentang masalah pekerjaan itu. Jadi ga’ ada masalah. Alhamdulillah sih ga’ ada masalah.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan program perbaikan rumah di lingkungan KSM Basma berjalan lancar tanpa kendala atau masalah yang ditemukan. Hal ini dikarenakan panitia yang terbentuk dalam program perbaikan rumah tersebut merupakan orang-orang yang

²⁸ Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

²⁹ *Ibid*

paham tentang masalah perbaikan rumah, sehingga tidak terjadi masalah dalam pelaksanaannya. Disamping itu dalam tempo waktu sepuluh hari perbaikan satu unit rumah di lingkungan KSM Basma bisa di selesaikan dengan baik tanpa masalah.

Jadi perbaikan rumah yang dilakukan di lingkungan KSM Basma bisa dikatakan sudah bisa memenuhi indikator efisiensi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka melaksanakan kegiatan perbaikan rumah dengan memanfaatkan dana yang ada secara gotong royong dan kerjasama antar masyarakat.

b. Perbaikan Saluran Air

Program perbaikan saluran air dari PNPM Mandiri dilakukan di dua KSM berbeda. Berikut rinciannya :

Tabel 8

Perbaikan saluran air BKM Amanah tahun 2009

| Nama KSM | Lokasi | Nilai Realisasi Swadaya | Nilai BLM PNPM | Total dana |
|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Bina Umat II | RT. 02/ 09 | Rp. 3.350.000,- | Rp. 16.750.000,- | Rp. 20.100.000,- |
| Seroja | RT. 01/ 07 | Rp. 3.250.000,- | Rp. 16.250.000,- | Rp. 19.500.000,- |

Perbaikan saluran air BKM Amanah tahun 2009 dilakukan di KSM Bina Umat II dan KSM Seroja di lokasi yang berbeda. Perbaikan saluran air di KSM Bina Umat II menghabiskan dana sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah). Dana tersebut berasal dari dana swadaya masyarakat yang berasal dari kas KSM dan sumbangan warga berupa alat kerja dan konsumsi sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dana BLM PNPM

Mandiri sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bapak Muhasan (45th) menyampaikan³⁰ :

”Dari masyarakat kita sini aja. Sumbangan kas RT ada, warga ada, terus sumbangan masyarakat terus juga emm istilahnya gotong royong bekerja gitu.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa perbaikan ini melibatkan beberapa tukang, mandor, dan masyarakat sekitar. Jadi walaupun ada tukang, masyarakat tetap diajak berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungan ini untuk mendukung kelancaran program perbaikan yang dilakukan. Bapak Muhasan (45th) menyampaikan³¹ :

”...jadi ya kita kan ada tukang, nah kita ada tukang dan ada mandor kan tetap kita libatkan masyarakat juga ya. Daripada mereka nonton kan kita ajak supaya karna posisinya kan lebih cepat lebih bagus. Kan gitu.”

Dari wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa masyarakat juga diajak untuk ikut serta dalam perbaikan saluran air ini. Hal inilah yang membedakan KSM Bina Umat II dengan KSM lainnya. Berikut penuturan ibu Rodyah (46th)³²:

”.....terus juga masyarakat partisipasinya tinggi. Karna kita juga ajak kadang-kadang misalnya ya bapak-bapaknya gak ada kita bisa ibu-ibu ngangkutin bata.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perbaikan saluran air di lingkungan KSM Bina Umat II juga sangat tinggi dimana semua masyarakat baik bapak-bapak maupun ibu-ibu turut serta dalam perbaikan saluran air ini. Hal ini menjadi faktor

³⁰ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat II, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

³¹ *Ibid*

³² Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Sabtu, 23 April 2011

pendukung dalam pelaksanaan perbaikan saluran air di lingkungan ini. Jadi masyarakat di lingkungan KSM Bina Umat II terkesan saling melengkapi dalam perbaikan saluran air di lingkungan ini. Ketika bapak-bapak tidak ada maka ibu-ibu mengambil alih tugas bapak-bapak dalam perbaikan saluran air di lingkungan ini. Bapak Muhasan (45th) menuturkan³³ :

”Gak ada. Alhamdulillah gak ada masyarakat sini. Gak ada kendala misal oh saya gak boleh gini gini misalnya gitu, gak ada. Sama sekali gak ada.”

Dari kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat seperti itu dapat memperkecil timbulnya kendala-kendala dalam pelaksanaan program di lingkungan tersebut. Sehingga dalam perbaikan saluran air di lingkungan KSM Bina Umat II bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apa-apa.

Perbaikan saluran air yang kedua dilakukan di KSM Seroja yang menghabiskan dana sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut berasal dari dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari dana BLM PNPM Mandiri sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Awal mula dari perbaikan saluran air di lingkungan ini yaitu melalui pengajuan proposal ke BKM Amanah setelah tembus dan dana cair baru perbaikan saluran air ini dilaksanakan.

Perbaikan saluran air di lingkungan ini berlangsung selama sembilan hari dengan volume sebesar seratus tiga puluh meter persegi. Perbaikan saluran air di

³³ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat II, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

lingkungan ini dilakukan oleh beberapa tukang dan masyarakat. Bapak Mulyadi (28th) menuturkan³⁴ :

”Ada tukang. Ada tukang berapa waktu itu. Banyak. Satu, dua, tiga, empat, tukangnya empat eh. Ya kalau pasang batu bata kan memang ga’ bisa sembarang orang bisa pasang kan. Kecuali kalo orang Bantu-bantu paling ya hanya nyediain doang, ngaduk, deketin, paling gitu-gitu doang.”

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan perbaikan saluran air di lingkungan KSM Seroja terdapat kerjasama antara tukang dan warga dimana tukang bertugas memasang batu bata dan masyarakat hanya sekedar ngaduk semen, nyediain peralatan atau hanya memantau saja. Koordinasi satu dengan lainnya juga dilakukan di lingkungan ini. Beliau menuturkan³⁵ :

“..... yang penting kita kan apa koordinasi sama lingkunganlah. Bebasin tanah bukan berarti bebasin kan.tanah itu milik orang itu kan. Kita mesti izin satu sama lainnya.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan perbaikan saluran air di lingkungan KSM Seroja terdapat koordinasi antara para KSM dengan masyarakat pemilik lahan sebelum pembangunan atau perbaikan infrastruktur dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah ketika perbaikan saluran air ini di laksanakan. Jadi sebelum perbaikan saluran air dilakukan, pihak KSM berkoordinasi dulu dengan masyarakat yang bersangkutan untuk melakukannya. Karna lahan yang dipakai kan merupakan milik masyarakat, tidak bisa sembarang orang menggunakannya tanpa izin. Jadi dengan adanya koordinasi dengan masyarakat pemilik lahan

³⁴ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

³⁵ *Ibid*

perbaikan saluran air di lingkungan KSM Seroja bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang berarti. Berikut penuturan Bapak Mulyadi (28th)³⁶ :

“Ya intinya kalo kesulitan sih ga’ ada. Ga’ ada yang berarti atau apa ga’ ada. Kebetulan memang apa ya lingkungannya udah sepakat untuk situ. Jadi ya sudah saling mendukung. Tidak ada masalah.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan perbaikan saluran air di lingkungan KSM Seroja berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan pernyataan diatas yang mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan perbaikan saluran air tidak ditemukan masalah ataupun kesulitan yang berarti karna sesama masyarakat saling mendukung dalam pelaksanaan program ini sehingga terlihat tidak ada kendala dan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan perbaikan saluran air di dua lingkungan ini.

c. Pembangunan Paving Blok

Tabel 9
Pembangunan Paving Blok BKM Amanah tahun 2009

| Nama KSM | Lokasi | Nilai Realisasi Swadaya | Nilai BLM PNPM | Total Dana |
|----------------|------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Sejati | RT. 01/ 04 | Rp. 4.130.000,- | Rp. 14.250.000,- | Rp. 18.380.000,- |
| Barokah | RT. 02/ 11 | Rp.12.681.000,- | Rp. 27.500.000,- | Rp. 40.181.000,- |
| Bina Sejahtera | RT. 01/ 13 | Rp. 6.242.000,- | Rp. 25.000.000,- | Rp. 31.242.000,- |
| Bina Umat I | RT. 01/ 01 | Rp. 8.313.000,- | Rp. 16.000.000,- | Rp. 24.313.000,- |
| Hasanah | RT. 01/ 07 | Rp.13.537.000,- | Rp. 14.250.000,- | Rp. 27.787.000,- |
| Berhasil | RT. 02/ 04 | Rp. 2.760.000,- | Rp. 9.250.000,- | Rp. 12.010.000,- |
| Usaha Bersama | RT. 01/ 11 | Rp. 8.409.000,- | Rp. 16.250.000,- | Rp. 24.659.500 |
| Makmur | RT. 02/ 13 | Rp.10.311.500,- | Rp. 29.000.000,- | Rp. 39.311.500 |

Berdasarkan tabel diatas, pembangunan paving blok oleh BKM Amanah telah dilakukan pada delapan KSM dengan lokasi dan volume yang berbeda-beda. Pada pembangunan paving blok, untuk mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang tercantum di atas para KSM harus mengajukan proposal

³⁶ *Ibid*

terlebih dahulu ke BKM Amanah kelurahan Peninggilan untuk nantinya di pertimbangkan dan di tinjau lokasi KSM yang akan dibangun oleh BKM Amanah yang merupakan kepanjangan tangan dari PNPM Mandiri. Sebelum para KSM mengajukan proposal ke BKM mereka mengadakan musyawarah untuk memilih lahan yang akan di bangun sarana fisik. Hal ini dikarenakan lahan yang akan di bangun sarana fisik dari PNPM Mandiri harus sudah bebas masalah. Bapak Anwar Rasyidi (54th) menuturkan³⁷ :

“Jalan yang diserahkan warga yang non masalah tidak ada masalah. Jika ada masalah itu yang betul-betul sudah tidak bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan apabila ada perjanjian batas minimal penggunaan itu lima tahun. Itu kalau aturan-aturan main. Kalau dibawah lima tahun tidak bisa. Dan pelaksanaan kesemuany juga harus apa jalan yang kita bangun itu minimal batas waktu kekuatannya tiga atau empat tahun. Batas untuk menguji kekuatannya. Sehingga kualitas bahan dan sebagainya harus betul-betul dan tidak sembarangan”.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan pembangunan paving blok tanah atau jalan yang diserahkan warga untuk diperbaiki harus tanah yang bebas dari masalah agar pada pelaksanaan pembangunannya nanti tidak menimbulkan masalah-masalah yang begitu berarti. Selain itu kualitas dari bahan bangunan yang akan digunakan pas pembangunan nanti juga harus kualitas yang baik dan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga para KSM tidak bisa sembarangan dalam menggunakan bahan bangunan. Pernyataan koordinator BKM tersebut dinyatakan juga oleh Bapak Dani, S.Pd, beliau menyatakan³⁸ :

³⁷ Wawancara dengan Koordinator BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Rabu, 13 April 2011

³⁸ Wawancara dengan Ketua KSM Makmur, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

“Kalau pembangunan jalan itu ya memang kita sudah apa musyawarah warga. Terutama masyarakat yang melewati itu ya kita panggil sebelum awalnya. Jadi mereka itu sangat diarahkan. Kebebasan tanah ini kan tidak sembarangan saja ya mbak ya. Perlu ada kesepakatan dengan lingkungan yang punya yang kita lewati jalan itu dengan ya terutama masyarakat pengurus RT ya. Kita kumpulkan mereka kemudian kita berikan masukan bahwa jalan ini kan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pada akhirnya mereka juga menyerahkan lah.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan pembangunan paving blok sama halnya dengan perbaikan saluran air. Sebelum tanah itu dibangun paving blok perlu ada kesepakatan antara para KSM dengan masyarakat lingkungan yang wilayahnya kita lewati untuk meminta persetujuan mengenai tanah yang akan dibangun agar nantinya tidak terjadi keributan mengenai tanah tersebut. Sehingga koordinasi satu dengan lainnya memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program infrastruktur ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Mulyadi (28th) sebagai berikut³⁹ :

“Pernah tapi dulu. Kebetulan bukan saluran ya tapi paving blok. Solusinya ya di ajak ngomong lah. Di ajak ngomong baik-baik gitu loh. Di jelasin manfaatnya supaya dia ngerti. Mungkin awalnya dia ga’ ngerti kenapa begini begini begini, apalagi dulu begitu ya. Sedikit lah. Kita ngelurusin jalan kan. Nyebrang sepuluh dua puluh senti meter. Tahu orangnya kan izin dulu ya itu saja.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa perlu adanya kesepakatan dan koordinasi dengan lingkungan dalam program pembangunan infrastruktur di lingkungan para KSM, terutama koordinasi dengan masyarakat yang tanahnya di lewati kegiatan pembangunan infrastruktur. hal ini di lakukan agar pelaksanaan PNPM Mandiri pada kegiatan infrastruktur bisa berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Karena tidak jarang hanya karna persoalan lahan yang

³⁹ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

terpakai untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ini menjadi kendala dalam pelaksanaan PNPM Mandiri program infrastruktur di kelurahan Peninggilan.

Setelah pemilihan lahan dilakukan barulah para KSM mulai menyusun proposal dan mengajukannya kepada BKM. Dalam pengajuan proposal tersebut, para KSM juga harus memiliki dana swadaya dua puluh persen dari total dana yang diajukan. Bapak Anwar Rasyidi (54th) menyatakan⁴⁰ :

“jadikan itu sudah menjadi aturan main. Misal: anggaran itu ya tadi yang saya katakan tadi itu bahwa anggaran dari PNPM itu. Anggaran yang kita laksanakan misalnya sepuluh juta, terus PNPM bisa bantu tujuh juta atau delapan juta. Nah yang dua juta atau sisanya itu swadaya masyarakat. Itu harus. Persyaratan mutlak harus ada swadaya dari masyarakat dan semua anggota. Karna memang yang ada dari PNPM terutama dari BKMnya itu sendiri memancing masyarakat untuk bertanggung jawab dan mengerjakan secara baik dan transparan. Karena kalau itu memang dikerjakan sendiri itu tanggung jawabnya akan lebih besar dan rasa memilikinya kan lebih besar daripada kita terima jadi. Jadi yang bekerja dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sistem kita pakai pemborong aja. Itu tidak boleh. Tidak ada. Karena apa? Karena semuanya sendiri.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa pengajuan dana swadaya telah menjadi aturan main dan persyaratan mutlak bagi para KSM dalam pelaksanaan PNPM Mandiri pada program infrastruktur. Dana swadaya tersebut di peroleh dari masyarakat, baik yang berupa sumbangan materil maupun non materil dari masyarakat yang lingkungannya ingin mendapat bantuan program pembangunan infrastruktur. Bapak Mahmudin, S.IP (32th) menyatakan⁴¹ :

“Dana swadayanya dari masyarakat.

⁴⁰ Wawancara dengan Koordinator BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Rabu, 13 April 2011

⁴¹ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Sejahtera, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

Dari masyarakat kita ada yang bentuknya tenaga, ada yang bentuknya makanan, minuman, itu pasti ada. Bahkan duitpun ada.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dana swadaya yang disiapkan KSM pada pengajuan proposal berasal dari masyarakat. Bentuk swadayanya pun beragam seperti : tenaga, makanan, minuman atau berupa bantuan dana. Bapak Muhasan (45th) juga menuturkan⁴²:

“ Dari masyarakat kita sini aja. Sumbangan kas RT ada, warga ada, terus sumbangan masyarakat, terus juga istilahnya gotong royong bekerja gitu”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dana swadaya yang dikumpulkan para KSM didapat dari bantuan masyarakat lingkungan sekitar. Selain bantuan swadaya berupa dana, alat-alat, atau tenaga, sumbangan berupa konsumsi yang diberikan masyarakat juga merupakan salah satu bentuk swadaya yang diberikan masyarakat. Bapak Dani, S.Pd (42th) menyatakan⁴³ :

“Terutama ya ini apa konsumsi ya, konsumsi untuk tukang, kerja bakti, dan segala macem itu ya kita ada urunan juga dari masyarakat. Ya kita bagi tugas untuk kopi yang lingkungan sini hari ini, apa gitu ya meeka pada ngerti. Mereka gak ada apa ya. Responnya bagus”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis kebanyakan swadaya yang ada dalam pelaksanaan program ini ialah berbentuk konsumsi baik kopi ataupun makanan lainnya. Dana swadaya masyarakat ini juga ada urunan dari masyarakat, tidak selalu KSM yang mengeluarkan dana. Hal ini dikarenakan respon masyarakat yang bagus dalam pelaksanaan program ini.

Selain itu dalam pembangunan paving blok partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dan bisa di sebut swadaya masyarakat juga. Karna tanpa adanya

⁴² Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat II, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

⁴³ Wawancara dengan Ketua KSM Makmur, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

partisipasi dari masyarakat kegiatan pembangunan ini tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Bapak Heriyanto (28th) menyatakan⁴⁴:

“Ya kita libatkan masyarakat gitu. Jadi kan ada yang masyarakat yang tidak membantu apa ya bentuk dana, jadi mereka bentuknya swadaya tenaga. Itu juga ditulis di LPJ. Jadi ada yang nyumbang alat, perabotan-perabotan kita masukin semua,. Jadi perabotan kita ga’ pake beli. Jadi warga yang nyiapin cangkul, nyiapin apa dan sebagainya.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan program infrastruktur ini terlihat adanya kerja sama masyarakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka. Selain itu partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran program dan pencapaian hasil. Partisipasi tersebut bisa berbentuk sumbangan dana, konsumsi, tenaga, alat kerja, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri program infrastruktur, hal ini biasa disebut swadaya masyarakat. Bapak Mulyadi (28th) juga menyatakan⁴⁵:

“Gotong royong. Bahkan ada beberapa tukang itu setiap hari masyarakat yang ngasih makan harian”.

Dari wawancara diatas peneliti menganalisis partisipasi masyarakat juga turut berperan dalam pembangunan infrastruktur. Jadi walaupun ada tukang dan sebagainya, masyarakat ikut turun ke lapangan untuk membantu kelancaran pembangunan program ini agar bisa lebih fokus dan terarah. Bentuk partisipasi dari masyarakat tersebut juga bisa menjadi faktor pendukung keberhasilan

⁴⁴ Wawancara dengan Ketua KSM Usaha Bersama, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

⁴⁵ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

pelaksanaan program infrastruktur yang dilakukan PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan. Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th) menyampaikan⁴⁶:

“Ya sesungguhnya untuk faktor pendukungnya itu adalah bagaimana keikutsertaan masyarakat secara kolektif. Kemudian aparat lokal, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya pokoknya unsure-unsur stakeholder terkaitlah. Itu yang mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan menjadi sangat beres. Lalu ini juga didasari oleh apa mereka mendukung. Oleh terjadinya sebuah internalisasi nilai-nilai yang sudah ditanamkan pada sosialisasi dan pelatihan sebetulnya. Desimenasi program ke masyarakat itu sudah sangat merata dan ini sudah sangat dihayati dan dipahami sebagai sebuah kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat itu sendiri.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa yang sesungguhnya menjadi faktor pendukung dari keberhasilan program infrastruktur PNPM Mandiri adalah keikutsertaan masyarakat secara kolektif. Jadi keikutsertaan masyarakat secara kolektif juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan program infrastruktur PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan.

Apabila kita berbicara tentang efisiensi tentu kita akan memikirkan tentang penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Berikut penuturan Bapak Mulyadi (28th) yang mengakui kejelian KSM Hasanah dalam mengoptimalisasikan dana yang mereka miliki ketika terjadi kekurangan dana pada saat pembangunan paving blok di lingkungan KSM Hasanah⁴⁷ :

⁴⁶ Wawancara dengan Korkot Kota Tangerang, Tangerang, Kamis, 31 Maret 2011

⁴⁷ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

“ya kan kekurangan dulu kan pernah swadaya terus dari KSM sendiri punya inisiatif kalau kastin disini ga berfungsi karena tanahnya lebar dan ga harus pakai kastin serta banyak gang-gang. Kastin itu dijual ditukar dengan paving blok”.

Dari kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan program infrastruktur tersebut muncul ide kreatif dari KSM Hasanah dalam mengoptimalkan biaya yang mereka dapat. Ketika terjadi kekurangan dana KSM berinisiatif menjual kastin dan menukarnya dengan paving blok. Bapak Muhasan (45th) juga mengatakan⁴⁸ :

”.....ya alhamdulillah namanya. Biar pun jalan setapak satu meter ya. Disana punya enam puluh lima meter, sembilan puluh, jadi seratus lebih juga sama. Seratus lebih swadaya apa tuh. Memang satu meter ini tapi kalo memang ini mah kemarinya kita nambah-nambahin gitu kalo pengen lebarin. Ya kalo kita pengen lebarin ya kita kemari-mari nambahin. Itu mah inisiatif lingkungan deh.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa ketika suatu lingkungan ingin membangun lebih dari yang ditentukan maka dari pihak KSM dan masyarakat lingkungan harus memiliki inisiatif bersama agar dengan budget yang dia miliki dia bisa membangun wilayahnya sesuai dengan yang masyarakat lingkungan tersebut inginkan. Di samping itu dengan adanya partisipasi dan swadaya masyarakat pada pelaksanaan program infrastruktur biaya yang dikeluarkan bisa terfokus untuk usaha pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri yang dapat memicu tingkat optimalisasi manfaat di lingkungan tersebut.

Usaha-usaha lain yang bisa dilihat dari pelaksanaan program infrastruktur PNPM Mandiri ini yaitu pendampingan dari para pemangku kebijakan terkait

⁴⁸ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat II, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

seperti Korkot, Fasilitator Kelurahan, dan Pengurus BKM. Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th) menuturkan bahwa⁴⁹ :

“Ya usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan Peninggilan itu ya yang pertama kita sebagai technical assistant ya, sebagai pendamping ya melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk optimalisasi peran BKM di situ, untuk mendorong kegiatan-kegiatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan secara kolektif.

Dari kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa usaha-usaha yang dilakukan para pemangku kebijakan terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri program infrastruktur yaitu berupa pendampingan untuk mengoptimalkan peran tiap pemangku kebijakan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu tim BKM juga memberikan bimbingan serta pendampingan selama pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tersebut. Bapak Mursalih (56th) menuturkan bahwa pengurus BKM Amanah sendiri terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bimbingan serta pendampingan untuk memonitor kegiatan tersebut, berikut penuturannya⁵⁰:

“Ya kita mengalami pekerjaan juga. Ya baik memberikan bimbingan pelaksanaan, ya kita ngawasin juga. Jadi betul-betul pekerjaannya juga.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa semua stakeholder memegang peranan dalam pelaksanaan program ini. Tidak hanya para KSM dan masyarakat yang melakukan kegiatan di lapangan tapi juga para pengurus BKM Amanah juga turut terjun ke lapangan untuk memantau dan mengarahkan kegiatan infrastruktur yang dilakukan. Selain pendampingan usaha

⁴⁹ Wawancara dengan Korkot Kota Tangerang, Tangerang, Kamis, 31 Maret 2011

⁵⁰ Wawancara dengan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

lain yang dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait dalam pelaksanaan PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran program infrastruktur yang dilakukan di kelurahan Peninggilan. Berikut penuturan Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th)⁵¹:

“.....sarana dan prasarana yang ada sudah cukupkah untuk mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan, saya pikir sebetulnya memang sarana dan prasarana inikan berbicara haru pada dimensi bahwa ini tidak, tidak harus, tidak harus ini semua, tidak harus apa namanya baik terus, ka nada rusaknya, begitu. Jadi saya pikir sarana dan prasarana yang ada sekarang ini relatif sudah mendukung.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah cukup mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri program infrastruktur di kelurahan Peninggilan. Jadi pada pelaksanaan PNPM di kelurahan Peninggilan tahun 2009 bisa dilihat alokasi dananya benar-benar dimanfaatkan secara tepat pada kegiatan infrastruktur di lingkungan masing-masing KSM.

4.2.3. Kecukupan

Berbicara mengenai kecukupan, hal ini berkaitan dengan seberapa besar pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah di suatu lingkungan. Kecukupan dalam kebijakan publik juga dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal Pada indikator kecukupan, peneliti memfokuskan pembahasan pada penerimaan manfaat dari kegiatan PNPM Mandiri yang dirasakan oleh masyarakat.

⁵¹ Wawancara dengan Korkot Kota Tangerang, Tangerang, Kamis, 31 April 2011

a. Perbaikan rumah

Pada program perbaikan satu unit rumah yang dilakukan oleh KSM Basma indikator kecukupan diukur dari seberapa jauh rumah yang diperbaiki tersebut bisa menjamin keberlangsungan hidup dari pemiliknya. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa masyarakat yang rumahnya diperbaiki merasa nyaman tinggal di rumah tersebut dan terlihat tidak ada masalah mengenai perbaikan rumahnya tersebut. Walaupun tidak terlalu bagus namun masyarakat pemilik rumah yang diperbaiki mengaku senang atas perbaikan rumahnya.

Walaupun tidak begitu rapi dan jauh dari kata mewah, namun menurut ketua KSM Basma rumah tersebut bisa dikatakan sudah cukup untuk menjamin keberlangsungan hidup pemiliknya. Cukup untuk menjamin keberlangsungan hidup dari pemiliknya maksudnya ialah rumah yang diperbaiki tersebut walaupun tidak bagus namun terlihat lebih rapi dan sehat. Bapak Djumeno (46th) menuturkan⁵² :

“Ya alhamdulillah rumah jadi rapi mungkin sehat ya bu ya. Bersih, sehat. Sebelumnya dulu ya ga’ gitu. Kesannya agak kumuh. Nah kebetulan rumah itu kan apa mbak ya dasarnya kita usulkan ya karna biar keberadaan saudara kita ga terlalu di bawah standar, supaya anulah. Karna dapat dana jadi ya udah kita ambil saja. Yang lain ga’ ada yang sanggup, tap RW. 07 sanggup. Dana cuma delapan juta bayangin bangun rumah coba. Bagus. Ya memang tidak bisa rapi banget, paling ya mendekati layak huni lah dari sebelumnya. Kalau di rapihin seperti yang kanan kirinya mungkin ya enggak. Dua puluh juta lah mbak baru. Biar yang punya rumah nanti nerusin dikit-dikit kalo ada.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa perbaikan rumah yang dilakukan di lingkungan KSM Basma sudah bisa

⁵² Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

memenuhi indikator kecukupan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang rumahnya diperbaiki tidak mengeluhkan apa-apa. Beliau hanya merasa senang atas rumahnya yang telah diperbaiki. Kini rumah yang tadinya terlihat kumuh menjadi terlihat lebih rapi dan sehat.

b. Perbaikan Saluran Air

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap perbaikan saluran air yang dilakukan di dua lingkungan KSM yang telah disebutkan sebelumnya terlihat tidak ada masalah mengenai panjang, luas, maupun volume dari saluran air tersebut. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan saluran air yang diperbaiki tersebut sudah cukup untuk menampung buangan-buangan air atau limbah rumah tangga dari masyarakat lingkungan tersebut. Namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mulyadi (28th) menyatakan bahwa saluran air di daerahnya masih ada satu line lagi yang harus dibenahi dan masih kurang panjang. Berikut penuturan beliau⁵³ :

“Tidak. Kan cuma dapet sekitar seratus sekian. Cuman kan kalo mau di terusin ya waktu itu ada kaitannya sama RT sebelah, jadi mesti komplikated sama sebelah. Itu yang bikin agak rumit. Cuman masih ada satu line lagi yang harus dibenahin. Cuman ga’ tahu nanti mungkin swadaya.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas ketika dikonfirmasi kenapa tidak diperpanjang saja beliau menuturkan bahwa kalau saluran air tersebut diperpanjang akan ada sangkutan dengan RT sebelah, beliau takut nantinya akan menjadi *complicated* dan rumit. Peneliti menganalisis bahwa hal seperti diatas tersebut bukanlah merupakan masalah yang berarti dalam indikator kecukupan

⁵³ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

karna dari pihak KSM sendiri sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi berdasarkan pernyataan diatas berikut hasil observasi dan wawancara peneliti, perbaikan saluran air yang dilakukan PNPM Mandiri sudah sesuai dengan indikator kecukupan.

c. Pembangunan Paving Blok

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terlihat bahwa masih ada masyarakat yang merasa kurang puas atas pembangunan paving blok yang dilakukan di kelurahan Peninggilan. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Nuraeni (35th), beliau kurang puas atas pembangunan paving blok yang dilakukan di lingkungannya, berikut penuturannya⁵⁴:

“Kalau menurut saya mah belum. Soalnya ga’ lebar jalannya. Kan yang saya bilang tadi bikin motor jatuh. Berapa kali sih motor jatuh di depan jalanan kita. Ya kurang lebar doing, harusnya dua meter biar mobil juga masuk”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa ibu Nuraeni merasa kurang puas atas pembangunan yang dilakukan di lingkungannya karena beliau merasa jalan paving blok yang dibangun didepan rumahnya kurang lebar. Ketika di konfirmasi ulang kepada Bapak H. Mursidi (60th) beliau menyatakan⁵⁵:

“.....bukannya kurang lebar, tapi memang dapat dari sana cuma satu meter. Nah kalau yang dari provinsi Banten itu yang tiga meter. Prosesnya lama, susah”.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa sebenarnya masalahnya bukan terletak pada kurang lebarnya jalan melainkan karna memang

⁵⁴ Wawancara dengan Masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

⁵⁵ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat I, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

peraturan dari PNPM mandiri sendiri yang menyebutkan lebar jalan dibangun satu meter. Namun di balik itu semua hampir semua KSM merasa puas dan cukup atas pembangunan yang dilakukan di lingkungan mereka. KSM bersyukur karena di lingkungan mereka bisa diadakan kegiatan pembangunan paving blok seperti itu. Walaupun tidak begitu lebar tapi mereka merasa senang dan terbantu dengan adanya PNPM Mandiri. Bapak Djumeno (46th) menuturkan⁵⁶:

“Kalau menurut saya sih sangat membantu ya dibandingkan dengan program yang dulu tidak ada PNPM”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan program infrastruktur PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan bisa sangat membantu masyarakat di bidang infrastruktur atau perbaikan lingkungan dibandingkan ketika belum ada PNPM mandiri di kelurahan Peninggilan. Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan dari Bapak Dani, S.Pd (42th)⁵⁷:

“.....ya karena memang itu usulan kita ya alhamdulillah masyarakat istilahnya banyak bangga hati ya”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dengan adanya pelaksanaan program infrastruktur PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan membuat masyarakat merasa terbantu dalam hal perbaikan lingkungan. selain itu masyarakat atau KSM yang mendapat bantuan program infrastruktur merasa bersyukur dan berbangga hati atas kelancaran program infrastruktur yang telah mereka lakukan. Jadi kecukupan dari pelaksanaan program pembangunan paving blok ini bisa dikatakan tercapai karena masyarakat dan para KSM merasa puas atas pembangunan paving blok tersebut.

⁵⁶ Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

⁵⁷ Wawancara dengan Ketua KSM Makmur, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

4.2.4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan.

Indikator ini berkenaan dengan pendistribusian secara merata dari hasil dan manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan PNPM di kelurahan Peninggilan. Artinya hasil dan manfaat dari pelaksanaan program infrastruktur di kelurahan Peninggilan bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Secara sekilas mungkin untuk tahun 2009 hampir seluruh lingkungan di kelurahan Peninggilan sudah merasakan hasil pembangunan fisik atau infrastruktur dari PNPM Mandiri. Namun sebenarnya masih ada lingkungan yang belum tersentuh oleh PNPM Mandiri. Hal ini disebabkan karena aparat lingkungan tersebut yang tidak aktif pada kegiatan-kegiatan di kelurahan Peninggilan. Di samping itu mereka juga tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi program ini sehingga tidak mengetahui informasinya sama sekali. Bapak Mursalih (56th) menuturkan⁵⁸:

“Memang kita belum semua KSM kebagian kan. Karena ga’ sekaligus. Mungkin tahun kemarin di KSM RT ini, tahun sekarang di RT ini. Gantian dengan RW yang lain”.

⁵⁸ Wawancara dengan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dalam pemberian dana BLM pada pelaksanaan PNPM Mandiri program infrastruktur di Kelurahan Peninggilan dilakukan secara bergantian antara lingkungan yang satu dengan yang lain. Tapi di ballik itu semua, hampir seluruh masyarakat Peninggilan merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri yang ada. Karena salah satu indikator keberhasilan dari PNPM itu sendiri ialah pendistribusian hasil kegiatan yang merata. Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th) menyatakan⁵⁹:

“yang merupakan target indikator keberhasilan kita bahwa salah satunya adalah bahwa pendistribusian secara merata kepada sasaran program”.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan PNPM mandiri adalah pendistribusian yang merata kepada sasaran program. Dalam hal ini peneliti menganalisis bahwa secara tidak langsung kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan sudah didistribusikan secara merata dan manfaatnya pun sudah bisa dirasakan oleh masyarakat kelurahan Peninggilan itu sendiri. Bapak Anwar Rasyidi (54th) menuturkan⁶⁰:

“Ya artinya memang untuk pelaksanaan program dan kepada masyarakat itu kan memang jalannya tu kan memang untuk digunakan masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang untuk menggalakan ekonomi dan kenyamanan masyarakat yang menggerakan. Dengan jadinya jalan itu ya merupakan distribusi secara langsung, baik kegiatan ekonomi dan keamanan masyarakat.”

⁵⁹ Wawancara dengan Korkot Kota Tangerang, Tangerang, Kamis, 31 Maret 2011

⁶⁰ Wawancara dengan Koordinator BKM Amanah, Tangerang, Rabu, 13 April 2011

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa pada dasarnya memang pelaksanaan program infrastruktur yang dilakukan ialah untuk memenuhi kebutuhan lingkungan di masyarakat yang nantinya manfaat tersebut akan digunakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Di samping itu peneliti menganalisis bahwa dengan adanya program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Kelurahan Peninggilan dapat mendukung kemajuan ekonomi dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan hal tersebut merupakan bentuk distribusi langsung dari PNPM Mandiri kepada masyarakat di Kelurahan Peninggilan.

a. Perbaikan Rumah

Dalam penelitian ini berdasarkan observasi yang peneliti lakukan khusus untuk perbaikan rumah yang dilakukan PNPM Mandiri mungkin belum semua masyarakat kelurahan Peninggilan bisa merasakan rumahnya diperbaiki oleh PNPM Mandiri. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 hanya ada satu rumah yang diperbaiki oleh PNPM Mandiri. Hal itu disebabkan karna hanya KSM Basma yang berani mengajukan proposal untuk perbaikan rumah. Sehingga dalam penelitian ini khusus untuk perbaikan rumah peneliti tidak melakukan evaluasi perbaikan rumah dengan indikator perataan.

b. Perbaikan Saluran Air

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, perbaikan saluran air yang dilakukan KSM Bina Umat II dan KSM Seroja manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh semua masyarakat di lingkungannya. Hal ini terlihat dengan sudah tidak adanya lagi air yang menggenang di lingkungan mereka. Selain itu limbah

rumah tangga yang ada di lingkungan mereka sudah bisa mengalir ke satu titik dan lingkungannya pun menjadi terlihat lebih rapi. Masyarakat sekitar lingkungan tersebut cukup puas dan senang atas perbaikan saluran air yang telah dilakukan. Walaupun hanya dua KSM yang mendapat bantuan perbaikan saluran air namun manfaatnya sudah bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat di kedua lingkungan tersebut. Itu berarti kegiatan atau program perbaikan saluran air di lingkungan tersebut sudah bisa mencapai indikator perataan.

c. Pembangunan Paving Blok

Pembangunan paving blok yang dilakukan oleh PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan hasilnya tentu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat baik itu masyarakat kelurahan Peninggilan maupun bukan masyarakat kelurahan Peninggilan. Hal ini dikarenakan yang namanya jalan baik itu lebar maupun sempit semua orang pasti merasakan manfaatnya. Baik itu manfaat yang dirasakan dari segi transportasi ataupun dari segi lainnya. Bapak Dani, S.Pd (42th) menuturkan⁶¹:

“Terutama orang yang berdekatan langsung dengan jalan tersebut. Bahkan dari warga komplek pondok lakah permai juga kalau ke atas lewat sini. Lebih mudah memang. Kalau dulu kan mereka berputar ke japos dulu sana. Sekarang kan bisa tembus sana.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa manfaat pembangunan paving blok telah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Peninggilan terlebih masyarakat yang rumahnya berdekatan langsung dengan jalan paving blok yang dibangun. Selain itu peneliti menganalisis bahwa

⁶¹ Wawancara dengan Ketua KSM Makmur, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

dari segi transportasi masyarakat di luar lingkungan KSM yang melakukan pembangunan paving blok bisa merasakan juga manfaat dari pembangunan tersebut. Selain itu dengan dibangun paving blok di lingkungan kelurahan Peninggilan, lingkungan yang tadinya becek, dibel, dan sebagainya kini menjadi lebih rapi dan tidak becek lagi ketika hujan. Bapak Heriyanto (28th) menyampaikan⁶² :

“Semuanya senang semuanya. Nah terutama yang depan rumahnya nih. Jadi kalau biasanya lewat itu becek atau apa apa ya itu jadinya bagus.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa semua masyarakat senang atas pembangunan yang dilakukan terutama yang rumahnya terlewati oleh jalan paving blok. Sehingga dengan dibangunnya paving blok tersebut lingkungan yang tadinya becek atau kurang bagus menjadi lebih bagus.

Namun dibalik itu semua masih ada beberapa lingkungan yang beberapa bagiannya belum tersentuh oleh program pembangunan infrastruktur kegiatan PNPM Mandiri. Hal ini dialami oleh ketua KSM Basma yang beberapa bagian di wilayahnya belum tersentuh oleh PNPM Mandiri. Berikut penuturan Bapak Djumeno (46th)⁶³:

“.....masih ada beberapa yang belum rapi semuanya mbak. Ada beberapa titik yang memang kita perlu gantian. Terus ya mungkin kita nunggu ada dananya dulu.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa masih ada lingkungan yang di beberapa titiknya belum mendapatkan dana BLM untuk pembangunan infrastruktur di lingkungannya. Namun peneliti menganalisis

⁶² Wawancara dengan Ketua KSM Usaha Bersama, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

⁶³ Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

bahwa para KSM cukup bersabar untuk mendapatkan bantuan selanjutnya, karna memang pemberian dana BLM di lingkungan Kelurahan Peninggilan dilakukan secara bergantian satu dengan lainnya. KSM Bina Umat II juga merasakan hal yang sama. Pada tahun 2009 lingkungan KSM Bina Umat II tidak mendapat bantuan pembangunan paving blok. Hal ini dikarenakan pada saat pengajuan proposal mereka tidak mengajukan proposal pembangunan paving blok. Ketua KSM Bina Umat II merasa di kelurahan Peninggilan hanya lingkungannya yang belum mendapat bantuan paving blok, baik itu dari PNPM maupun dari pihak lainnya. Berikut penuturan Bapak Muhasan (45th)⁶⁴:

“....kita paving blok aja masih ngajuin sana sini belum nembus nih. Ini paving blok ini kita sampai kita ngajuin ya. Istilahnya kita juga kan nanya juga sekarang tuh sama pak siapa tuh yang orang BKM yang baru itu pak haji Hamid kita juga beberapa kali sudah nanya ke dia. Kalau saya bilang masa sih di RW. 09 ya pas tempatnya di RW gitu ya yang belum di paving blok itu. Saya bilang tolonglah kalau bisa diajuin paling dulu lah karna se-Peninggilan cuma ini aja yang masih begini belum di paving blok gitu.”

Berdasarkan kutipan wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menganalisis bahwa memang hanya lingkungan KSM Bina Umat II saja yang belum dipaving blok namun hal ini terjadi karna pada tahun 2009 yang mereka usulkan adalah perbaikan saluran air bukan pembangunan paving blok sehingga bantuan yang mereka dapatkan adalah untuk perbaikan saluran air bukan untuk pembangunan paving blok. Masyarakat di lingkungan KSM Bina Umat II juga merasa apabila di lingkungannya di pasang paving blok maka akan terlihat lebih rapi. Berikut penuturan Bapak Ijih (50th)⁶⁵:

⁶⁴ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat II, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

⁶⁵ Wawancara dengan Masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Sabtu, 23 April 2011

”.....kalo ada paving blok nih lebih bagus saluran air gitu keliatannya. Lebih rapi gitu istilahnya.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa masyarakat tersebut sebenarnya menginginkan adanya bantuan paving blok di lingkungannya. Namun kembali lagi pada apa yang diusulkan oleh KSM lingkungannya sendiri.

Bila terjadi masalah seperti diatas maka program pembangunan paving blok dari KSM yang belum mendapatkan bantuan langsung masyarakat untuk pembangunan paving blok akan di anggarkan pada program pembangunan infrastruktur selanjutnya. Untuk mendapatkan kejelasan dalam hal ini peneliti mengkonfirmasi hal ini kepada Bapak Mursalih (56th) berikut pernyataannya⁶⁶:

“Ya nanti kita usahakan di periode berikutnya. Nanti kan namanya program jangka menengah gitu kan, kita programin lagi. Kita masukin lagi di program berikutnya.”

Dari pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa hal yang dilakukan pengurus BKM Amanah ketika menghadapi hal tersebut yaitu dengan memprioriaskan lingkungan di kelurahan peninggilan yang belum mendapat bantuan dana BLM pada periode berikutnya dengan memasukan kegiatan tersebut ke program berikutnya. Agar pembangunan program infrastruktur bisa lebih merata sebaiknya BKM Amanah ataupun KSM tidak hanya diam melainkan berusaha untuk mencari ide-ide segar ataupun terobosan-terobosan baru untuk bisa lebih mandiri dan tidak hanya menunggu dari dana BLM saja. Dari pihak BKM dan KSM harus sama-sama aktif memberikan dan atau melakukan

⁶⁶ Wawancara dengan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

pelatihan-pelatihan. Walaupun masih ada lingkungan yang belum mendapat bantuan program infrastruktur namun secara keseluruhan pelaksanaan PNPM mandiri program infrastruktur sudah bisa memenuhi indikator perataan.

4.2.5. Responsivitas

Responsivitas merupakan bentuk ketanggapan dan atau tanggung jawab daripada pemangku kebijakan terhadap program yang dia lakukan. Responsivitas dalam kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Indikator ini bisa dilihat dari bagaimana para pemangku kebijakan merespon atau menanggapi tiap-tiap permasalahan yang terjadi di lapangan serta bentuk tanggung jawab mereka terhadap program yang mereka buat.

Responsivitas BKM Amanah dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat di lihat dari proses pendampingan dan ketanggapan tim BKM sendiri dalam melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program tersebut.

a. Perbaikan Rumah

Pada program perbaikan rumah yang dilakukan di lingkungan KSM Basma terlihat tim BKM Amanah kelurahan Peninggilan cukup responsif dalam mendampingi dan mengarahkan para KSM dalam pelaksanaan program perbaikan rumah di lingkungan KSM Basma. Para pengurus BKM Amanah ikut terjun langsung ke lapangan untuk memonitor kegiatan perbaikan rumah agar perbaikan

rumah tersebut bisa sesuai dengan apa yang di inginkan. Bapak Djumeno (46th) menuturkan⁶⁷ :

“...pas pelaksanaan kita ikut terjun. BKM juga ikut. Ya kita ga’ kerja sendiri. Ya memang kerja sama dan ikut mengarahkan. Bukan ngawasin tapi mengarahkan supaya pembangunan itu sesuai dengan apa yang di inginkan.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa walaupun di lingkungan KSM Basma ini sudah terbentuk panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program perbaikan rumah di lingkungan tersebut, pihak KSM tidak lepas tangan begitu saja. Mereka juga turut berpartisipasi dalam program tersebut. Bapak Djumeno (46th) kembali menuturkan⁶⁸ :

“.....walaupun kita dah bentuk panitia ya untuk apa namanya ya berpartisipasi jadi tidak kita lepas begitu saja.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan perbaikan rumah yang ada di lingkungan KSM basma para KSM tidak lepas tangan begitu saja melainkan ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Hal ini berarti ada koordinasi dan kerja sama yang baik antar BKM, KSM dan masyarakat lingkungan tersebut. Bapak Basri (49th) pun mengakui hal tersebut. Beliau melihat keseriusan dari masyarakat yang membantu perbaikan rumahnya tersebut. Terlebih kerja samanya begitu terlihat. Berikut penuturannya⁶⁹ :

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Wawancara dengan Masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

“ Ya istilahnya serius gitu. Orang ada kerja samanya gitu. Ya RT sini kerja samanya ada gitu.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa para KSM, BKM, dan masyarakat benar-benar serius membantu dan bekerja sama dalam memperbaiki rumah tersebut. Jadi bisa dikatakan para pengurus KSM Basma dan BKM Amanah serta masyarakat yang ada di lingkungan tersebut cukup responsif dalam membantu program perbaikan rumah di lingkungan KSM basma.

b. Perbaikan Saluran Air

Pada penelitian tentang evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2009, untuk program perbaikan saluran air peneliti mengukur indikator responsifitas dari ketanggapan pengurus KSM dan BKM dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Bapak Mulyadi (28th) menuturkan⁷⁰ :

“Ya pasti. Baru denger suara sedikit saja langsung kita datengin permasalahannya. Kita jelasin manfaatnya. Kenapa kita jelasin manfaatnya? Kalau dia keberatan maunya apa kita tampung.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dalam pelaksanaan program mereka cukup tanggap dalam menangani masalah tersebut. Ketika mendengar ada warga yang komplain dan sebagainya mereka langsung mendatangi warga tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang tepat kepada masyarakat sampai masyarakat mengerti. Bapak Mulyadi (28th) kembali menuturkan⁷¹ :

“Iya. misal saya mau begini tapi saya mau begini. Okelah kita laksanakan bareng-bareng. Cari titik tengahnya. Kita dah jalani juga.”

⁷⁰ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

⁷¹ *Ibid*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam penyelesaian masalah yang terjadi ketika pelaksanaan program infrastruktur adalah semacam ada sharing antar pengurus dengan masyarakat. Peneliti menganalisis bahwa hal ini dilakukan agar bisa ditemukan titik tengahnya sehingga antara pihak yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang keberatan satu sama lain. Sama-sama mendapatkan manfaat dari pembangunan ini dan agar dari masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

c. Pembangunan Paving Blok

Dalam pembangunan paving blok pengurus BKM Amanah bisa dikatakan cukup responsif dalam pelaksanaan program infrastruktur PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan. Terlebih dalam hal peninjauan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur. Bapak Mahmudin, S.IP (32th) menuturkan⁷²:

“.....kita pengajuan langsung ditinjau di lokasi setempat. Ternyata masyarakat membutuhkan ya udah diberikan. Kalau memang dananya ada terus lagi dari BKMnya setuju ya udah ga’ ada masalah buat kita”.

Dari kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa terdapat respon yang baik dari pengurus BKM yang cepat tanggap dalam pelaksanaan program infrastruktur PNPM Mandiri dimana para pengurus BKM tidak bertele-tele dalam pemberian BLM untuk kegiatan infrastruktur di kelurahan Peninggilan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Dani, S.Pd (42th) sebagai berikut⁷³:

“Ya mereka juga terjun memberikan arahan. Misalnya ada hal-hal yang kurang baik atau kurang beres. Itu dari mereka. Ya mereka juga membantu kita. Ketika dana telah diserahkan kita tidak dilepaskan begitu saja, mereka terjun membantu.”

⁷² Wawancara dengan Ketua KSM Bina Sejahtera, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

⁷³ Wawancara dengan Ketua KSM Makmur, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

Dari kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa tim BKM dan Faskel cukup tanggap dalam kegiatan pembangunan paving blok ini karena mereka selalu memantau dan mengarahkan para KSM dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan paving blok di lingkungan KSM. Jadi ketika dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah diserahkan kepada para KSM, pengurus BKM Amanah dan fasilitator kelurahan Peninggilan tidak lepas tangan begitu saja. Mereka ikut terjun ke lapangan dan memberikan arahan. Bapak Mursalih (56th) juga turut menuturkan⁷⁴ :

“ Oh tanggap faskelnya. Faskel semua kerja sama bareng-bareng, kalau ada masalah ya kita selesaikan bareng. Ga’ bisa sendirilah”.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan paving blok di kelurahan Peninggilan, seluruh tim PNPM saling melakukan kerja sama dan atau koordinasi satu dengan lainnya. Faskelnya pun tanggap ketika terjadi masalah pada saat pelaksanaan program. Hal ini diperkuat oleh penuturan Bapak Mulyadi (28th). Berikut penuturannya⁷⁵ :

“Pernah tapi dulu. Kebetulan bukan saluran ya tapi paving blok. Solusinya ya di ajak ngomonglah. Di ajak ngomong baik-baik gitu loh. Di jelasin manfaatnya supaya dia ngerti. Mungkin awalnya dia ga’ ngerti kenapa begini begini begini., apalagi dulu begitu ya. Sedikitlah. Kita ngelurusin jalan kan. Nyebrang sepuluh dua puluh senti meter. Tahu orangnya kan izin dulu ya itu saja. Yang intinya koordinasi lah.”

Dari kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis respon yang cepat tanggap dari KSM dan BKM ketika terjadi masalah pembangunan paving blok di

⁷⁴ Wawancara dengan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

⁷⁵ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

lingkungannya. Ketika ada yang komplain atau protes atas pemabngunan yang dilakukan para pengurus KSM sebisa mungkin langsung menyelesaikannya dan memberi arahan kepada mayarakat yang komplain tentan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th) yang menyatakan ketanggapan tim PNPM Mandiri dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan. Berikut penuturannya⁷⁶:

“.....pada level kelurahan itu ada yang namanya tim fasilitator yang dikepalai, di koordinasi, di apa ya namanya dipimpin oleh senior fasilitator. Nah, jadi ketika misalnya ada persoalan di masyarakat kelurahan peninggalan khususnya, pertama di selesaikan dulu di tingkat fasilitator. Apakah bias diurai persoalannya, kemudian bisa diatasi persoalannya. Nah kalo misalnya sudah terurai, teratasi persoalan-persoalannya itu maka ya udah sampai disitu klir dan selesai. Ya sudah. Tetapi jika tidak, maka kemudian dilaporkan kepada asisten masing-masing ini terkait dengan apa nih persoalannya. Apakah terkait dengan sosialkah, kelembagaankah, gitu ya. Apakah terkait dengan keuangankah, lapangankah, atau terkait dengan program. Kalau dengan program itu nanti dengan CD dan askot infrastruktur yang menangani itu. Tetapi kalau dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi terkait dengan BKM-BKM yang belum, ya langsung kepada askot infrastruktur, asisten infrastruktur. Nah untuk penyelesaian persoalannya, penyelesaiannya ini bila terkait dengan keuangan, penyimpangan, dan sebagainya ini ada asisten apa namanya Korkot yang menangani bidang manajemen keuangan. Nah setelah itu misalnya tidak mampu, maka kemudian kita bersama-sama Korkot melaporkan ini ke KMW. KMW juga begitu mekanismenya. Diselesaikan dulu, setelah kalau tidak mampu ada KMP, kalau tidak mampu ada PMU, dan sebagainya”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan ketika pelaksanaan program infrastruktur PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan. Peneliti menganalisis bahwa ketika suatu permasalahan terjadi di suatu wilayah maka sebisa mungkin permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat fasilitator. Bila di tingkat fasilitataor

⁷⁶ Wawancara dengan Korkot Kota Tangerang, Tangerang, Kamis, 31 Maret 2011

persoalan tersebut tidak bisa diurai dan diatasi maka permasalahan tersebut akan dinaikkan levelnya ke tingkat senior fasilitator atau ke tingkat askot atau korkot tergantung letak permasalahannya. Jika masalah tersebut tidak terselesaikan juga di tingkat Korkot maka nantinya secara bersama-sama akan di selesaikan di tingkat KMW, KMP dan atau PMU.

Bentuk responsifitas pengurus BKM dapat di lihat dari tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Hal ini dipertegas oleh koordinator BKM Amanah dimana ketika dalam pelaksanaan program infrastruktur terjadi suatu masalah maka pengurus BKM ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah tersebut. Bapak Anwar Rasyidi (54th) menuturkan⁷⁷ :

“Bertanggung jawab. Jadi artinya kalau kita misalkan ketemukan berbagai masalah jadi kita selesaikan dengan musyawarah dahulu. Kemudian cari jalan keluarnya untuk menanggapi.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa pengurus BKM turut bertanggung jawab ketika terjadi permasalahan saat pelaksanaan program melalui musyawarah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dalam penyelesaian masalahnya pun para KSM tidak bisa sembarangan mengadakan permasalahannya. Pengaduan masalah tersebut harus dilakukan secara tertulis. Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th) menjelaskan⁷⁸ :

“Ini disini ada program namanya pengaduan masyarakat. Bilamana memang pelaksanaan program di tingkat lapangan itu dirasa tidak sesuai dengan sasaran itu bisa mengadu bisa melaporkan tapi tentunya secara tertulis. Di sini kan ada pelaporan yang dilakukan secara bukti nyata dan

⁷⁷ Wawancara dengan Koordinator BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Rabu, 13 April 2011

⁷⁸ Wawancara dengan Korkot Kota Tangerang, Tangerang, Kamis, 31 Maret 2011

tidak fitnah. Oleh karena itu maka laporan harus dibuktikan secara tertulis dan ada bukti gitu loh. Begitu.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa apabila para KSM atau BKM merasa bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri tidak sesuai dengan sasaran program maka mereka bisa melakukan pengaduan melalui program pengaduan masyarakat. Pengaduan yang dilakukan harus bersifat tertulis untuk nantinya dijadikan bukti dan tidak fitnah. Setelah pengaduan tersebut dilakukan oleh BKM maupun KSM, nantinya akan ada tanggapan dari pihak faskel maupun karkot mengenai masalah yang diadukan, tergantung seberapa besar duduk permasalahannya. Berikut penuturan Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th)⁷⁹:

“Ya begini, didalam PNPM Mandiri Perkotaan itu ada konsultan yang mendampingi masyarakat. Nah pada level kelurahan itu ada yang namanya tim fasilitator yang dikepalai, dikoordinasi, di apa ya namanya, di pimpin oleh senior fasilitator. Nah jadi ketika misalnya ada persoalan di masyarakat kelurahan Peninggilan khususnya, pertama diselesaikan dulu di tingkat fasilitator. Apakah bisa diurai persoalannya, kemudian bias diatasi persoalannya. Nah kalau misalnya sudah terurai teratasi persoalan-persoalannya itu maka ya udah sampai di situ. Klir dan ya sudah. Tetapi jika tidak maka kemudian dilaporkan kepada asisten masing-masing ini terkait dengan apa ni persoalannya. Dengan sosialkah, lapangankah, kelembagaankah, gitu ya.

Kalau dengan program itu nanti dengan CD dan askot infrastruktur yang menangani itu. Tetapi kalau dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi terkait dengan BKM yang belum ya langsung kepada askot infrastruktur dan asisten infrastruktur.nah untuk penyelesaiannya, persoalan penyelesaiannya ini bila terkait dengan keuangan, penyimpangan, dan sebagainya ini ada asisten apa namanya karkot yang menangani bidang manajemen keuangan. Nah setelah itu misalnya tidak mampu maka kemudian kita bersama-sama karkot melaporkan ini ke KMW. KMW juga begitu mekanismenya, diselesaikan dulu, setelah kalau tidak mampu ada KMP, kalau tidak mampu ada PMU, dan sebagainya. Tetapi ada level-level tingkatan kelurahan sih. Saya pikir yang sudah di alami sekarang ini dari tahun 2007 sampai 2011 ini ya saya pikir kendala

⁷⁹ Ibid

persoalan itu bisa selesai di tingkatan SF. Ada hanya satu dua yang diselesaikan di tingkat korkot dan tidak sama sekali ada di level Konsultan Manajemen Wilayah Provinsi Banten saat ini.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi ada beberapa jenjang penyelesaian permasalahan yang dilakukan mulai dari level kelurahan sampai level KMW untuk diselesaikan. Jika tidak terselesaikan juga maka akan dinaikan levelnya ke KMP, PMU dan seterusnya sampai masalah tersebut benar-benar bisa diselesaikan. Berdasarkan pernyataan diatas juga peneliti menganalisis bahwa dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dari tahun 2007 sampai 2011 hampir semuanya bisa diselesaikan di tingkat kelurahan hanya beberapa saja yang naik ke level korkot ataupun KMW. Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th) juga mengakui ketangapan dari tim PNPM Mandiri pada pelaksanaan PNPM Mandiri program infrastruktur di Kelurahan Peninggilan. Beliau menyatakan⁸⁰:

“wah, kalau misalnya ada di beberapa tempat yang lain lah, bukan Kelurahan Peninggilan saja itu cukup responsive.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa para stakeholder terkait dengan pelaksanaan program infrastruktur PNPM mandiri di Kelurahan Peninggilan cukup responsif. Dari ketiga program pembangunan infrastruktur tersebut bisa dilihat responsifitas pengurus BKM Amanah, Fasilitator Kelurahan dan para pengurus KSM dalam pelaksanaan program infrastruktur yang sudah baik.

⁸⁰ Wawancara dengan Korkot Kota Tangerang, Tangerang, Kamis, 31 Maret 2011

4.2.6. Ketepatan

Indikator ini lebih cenderung kepada hasil yang berguna dan tepat sasaran. Apakah hasil yang diinginkan benar-benar bisa memberi manfaat kepada sasaran program. Dikatakan berguna dan atau bermanfaat ketika memang hasil tersebut terpenuhi secara baik dan benar-benar sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

a. Perbaikan Rumah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada ketua KSM dan masyarakat lingkungan Basma terlihat bahwa program perbaikan rumah yang dilakukan pada lingkungan KSM basma sudah tepat sasaran. Berikut penuturan Bapak Djumeno (46th)⁸¹:

“ya alhamdulillah rumah jadi rapi, mungkin sehat ya bu, bersih, sehat. Sebelumnya dulu ga gitu. Kesannya agak kumuh. Nah kebetulan rumah itu kan dasarnya. Kita usulkan ya karena biar keberadaan sadara kita ga’ terlalu di bawah, standar.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa perbaikan rumah yang dilakukan di lingkungan KSM Basma sudah tepat. Hal ini sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan dimana rumah yang tadinya kumuh terlihat lebih rapi, sehat, dan bersih. Selain tepat sasaran perbaikan rumah yang dilakukan di lingkungan KSM Basma juga sesuai dengan target yang tercantum dalam proposal. Bapak Djumeno (46th) menuturkan⁸² :

“Tepat sasaran, tepat waktu. Ya pokoknya pemerintah kalau mau ngucurin dana ke KSM ga’ usah takut. Sampe itu. Intinya semua ngerasain. Karna yang lebih tahu kan yang di bawah. Kalau seperti itu ya memang Bantu ya. Dengan adanya PNPM Mandiri semuanya jadi rapi,

⁸¹ Wawancara dengan Ketua KSM Basma, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

⁸² *Ibid*

bersih. Mungkin ya wilayah-wilayah yang keurus ya baik. Ya intinya ya bisa dikatakan seperti itu. Pengelolaannya langsung tepat sasaran.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan program perbaikan rumah yang dilakukan di lingkungan KSM basma tepat sasaran dan tepat waktu. Peneliti juga menganalisis bahwa indikator ketepatan dalam program perbaikan rumah yang dilakukan KSM Basma didukung pula oleh tepatnya KSM tersebut dalam memilih sasaran penerima manfaat dari perbaikan rumah tersebut. Masyarakat pemilik yang rumahnya telah diperbaiki oleh PNPM mandiri mengaku senang dan bersyukur atas perbaikan rumahnya. Berikut penuturan Bapak Basri (49th) yang rumahnya diperbaiki⁸³ :

“..... saya gak bisa ngungkapin. Cuma hanya bisanya ya bersyukur ya. Berterima kasih sama orang, masyarakat sini gitu. Juga sama PNPM Mandiri ya.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa masyarakat yang menjadi sasaran program perbaikan rumah di lingkungan KSM Basma senang atas perbaikan yang dilakukan terhadap rumahnya. Beliau berterima kasih dan bersyukur atas hal ini.

b. Perbaikan Saluran Air

Perbaikan saluran air yang dilakukan di lingkungan KSM Seroja dan KSM Bina Umat II sudah tepat sasaran. Dengan diperbaikinya saluran air di lingkungan kedua KSM tersebut maka tidak ada lagi air yang tergenang atau meluap ketika hujan dan saluran air yang ada pun terlihat lebih rapi dan teratur. Masyarakat yang tadinya akan membuat saluran air sendiri jadi tidak jadi karna saluran air yang

⁸³ Wawancara dengan Masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

dibangun PNPM mandiri bisa lebih rapi dan terarah. Selain itu saluran air tersebut juga bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Mulyadi (28th) menuturkan⁸⁴ :

“Pastilah. Karna banyak orang manfaatin. Yang tadinya pada mau bikin apa yang orang betawi itu apa ya namanya empang. Yang tadinya banyak empang kan ya akhirnya pada nyalur di got.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa perbaikan saluran air yang dilakukan sudah tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat lingkungan tersebut. Selain itu peneliti juga menganalisis dengan adanya perbaikan saluran air yang dilakukan dapat menghindari pembangunan-pembangunan fasilitas yang tidak perlu. Dengan adanya saluran air ini tidak ada lagi air yang menggenang atau meluap ketika hujan. Semuanya mengalir terarah ke satu titik. Berikut penuturan Bapak Mulyadi (28th)⁸⁵:

“Ya menurut saya sih bagus. Buktinya sekarang dengan adanya saluran air kan semua bias terarah. Tidak lari kemana-mana, terus lokasi lingkungan juga jadi bersih. Yang tadinya airnya genang sekarang udah lancar di satu titik, kan gitu.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa perbaikan saluran air yang dilakukan sudah bagus. Dengan adanya saluran air semuanya bisa terarah dan mengalir di satu titik. Selain itu berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, dengan adanya kegiatan perbaikan saluran air lingkungan tersebut menjadi lebih rapi dan sehat karna tidak ada genangan air.

Masyarakat lingkungan KSM Seroja pun turut bersyukur atas adanya perbaikan saluran ini. Masyarakat tersebut merasa perbaikan saluran air tersebut

⁸⁴ Wawancara dengan Ketua KSM Seroja, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

⁸⁵ *Ibid*

sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan lingkungan mereka. Berikut penuturan Bapak Ijih (50th)⁸⁶:

“Tepat lah ya. Air jadinya gak lari kemana-mana. Bersyukurlah.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa perbaikan saluran air yang dilakukan sudah tepat sasaran sehingga air limbah rumah tangga pun tidak mengalir kemana-mana. Hal ini juga senada dengan yang dirasakan oleh ketua KSM Bina Umat II. Mereka merasa senang atas perbaikan saluran air yang dilakukan karna dengan adanya perbaikan saluran air ini, saluran air swadaya masyarakat yang hanya beberapa senti kini berubah menjadi lebih bagus, rapi, dan teratur. Bapak Muhasan menuturkan⁸⁷ :

“..... alhamdulillah sudah. Istilahnya kalau dulu kan cuma hanya saluran air swadaya masyarakat kan tahu sendiri yang namanya swadaya segala macam kita juga. Berapa senti sih, gitu. Kan kalau sekarang alhamdulillah.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa perbaikan saluran air yang dilakukan di lingkungan KSM Bina Umat II sudah tepat sasaran. Peneliti menganalisis bahwa ketua KSM Bina Umat II bersyukur karna berkat adanya program infrastruktur PNPM mandiri saluran air di lingkungannya menjadi lebih panjang dan lebih lebar dibandingkan saluran air sebelumnya. Hal ini berarti perbaikan saluran air di lingkungan KSM Seroja dan KSM Bina Umat II sudah memenuhi indikator ketepatan.

⁸⁶ Wawancara dengan Masyarakat penerima manfaat PNPM Mandiri, Tangerang, Sabtu, 23 April 2011

⁸⁷ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Umat II, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

c. Pembangunan Paving Blok

Program pembangunan paving blok yang dilakukan oleh beberapa KSM tidak lain dan tidak bukan adalah agar jalan-jalan yang ada di lingkungan KSM tersebut terlihat lebih rapi dan teratur. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, pembangunan paving blok di lingkungan beberapa KSM tersebut sudah tepat sasaran. Manfaatnya pun sudah bisa dirasakan oleh semua masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan tersebut. Bapak Rohim Abdullah (30th) menuturkan⁸⁸ :

“Kalau menurut saya ya namanya jalan ya semua orang pasti butuh ya. Terutama apalagi ini dana pemerintah. Di sini kan namanya PNPM ya kita pemberdayaan masyarakat ya. Itupun kita juga swadaya lagi dengan masyarakat. Itu ya proses. Sangat-sangat baguslah saya rasa ya.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa dengan adanya program infrastruktur PNPM Mandiri dilingkungannya sangat bagus untuk memperbaiki lingkungan terutama jalan. Peneliti menganalisis bahwa jalan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat juga. Jadi dengan adanya jalan merupakan bantuan yang tepat untuk masyarakat Kelurahan Peninggilan. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Dani, S.Pd (42th). Berikut pernyataannya⁸⁹:

“.....sesuai dengan keinginan masyarakat. Juga sesuai dengan apa yang kita usulkan bersumber dari masyarakat tersebut.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa hasil kegiatan pembangunan paving blok ini sudah sesuai dengan apa yang masyarakat usulkan

⁸⁸ Wawancara dengan Ketua KSM Barokah, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

⁸⁹ Wawancara dengan Ketua KSM Makmur, Tangerang, Minggu, 17 April 2011

dan butuhkan karena apa yang diusulkan dan dibangun bersumber dari masyarakat sendiri sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Mahmudin, S.IP (32th). Berikut pernyataannya⁹⁰ :

“Ya sudahlah. Sekarang kan transportasi. Walaupun selama ini mungkin gak masuk motor karna becek, jalan dibel. Sekarang kan dah bisa nyambung antara sini dengan sini. Lebih gampang lah. Otomatis lebih enak.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa lokasi pembangunan paving blok yang dibangun di lingkungan KSM Bina Sejahtera sangat tepat sasaran khususnya untuk transportasi karna bisa menghubungkan wilayah yang terputus di daerahnya. Selain itu sejauh penelitian ini, hasil dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan PNPM Mandiri sudah tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat yang lingkungannya membutuhkan perbaikan atau pembangunan beberapa infrastruktur. Bapak Anwar Rasyidi (54th) menyatakan⁹¹ :

“Ya alhamdulillah kalau untuk program itu. Kalau artinya tepat sasaran itu iya. Karna kalau untuk kondisi BKM atau untuk masyarakat sekarang itu kan tidak hanya yang menimbulkan kemiskinan itu tidak hanya dari dalam atau tidak ada ekonomi dan lain sebagainya, tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk fisik ya memang sudah tepat sasaran.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa hasil dari program infrastruktur yang dilakukan PNPM Mandiri sudah tepat sasaran. Karna untuk kegiatan fisik ini bisa mendukung kegiatan ekonomi dan kenyamanan

⁹⁰ Wawancara dengan Ketua KSM Bina Sejahtera, Tangerang, Sabtu, 16 April 2011

⁹¹ Wawancara dengan Koordinator BKM Amanah Kelurahan Peninggilan, Tangerang, Rabu, 13 April 2011

masyarakat di Kelurahan Peninggilan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Dr.(c) Yumhi, ST, MM (29th), berikut pernyataannya⁹² :

“Ya sebelum bicara tujuan apakah tujuan PNPM Mandiri itu dapat memuaskan kebutuhan pemangku kebijakan terkait ya saya rasakan itu bisa sangat memuaskan. Kemudian kalau adik tanyakan tentang tujuan atau hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya iya. Secara laporan kami berdasarkan pemantauan dan progress kegiatan di lapangan. Berdasarkan triangulasi yang kita lakukan. Uji-uji kebenaran itu ya saya pikir tujuan atau hasil yang dicapai sesuai. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena memang dasar-dasar program yang diajukan masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa sesuai dengan pemantauan lapangan yang dilakukan karkot kota Tangerang tujuan atau hasil yang dicapai dari program infrastruktur PNPM Mandiri sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga didasari pada program yang diajukan masyarakat yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi dapat dikatakan hasil atau manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan sudah tepat sasaran.

⁹² Wawancara dengan Karkot Kota Tangerang, Kamis, 31 Maret 2011

Bila digambarkan dalam bentuk tabel maka evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan Tahun 2009
Program Perbaikan Rumah

| No. | Indikator | Terpenuhi | Tidak terpenuhi | Skor | Skor maksimal |
|-----|---------------|-----------|-----------------|------|---------------|
| 1. | Efektifitas | √ | | 10 | 10 |
| 2. | Efisiensi | √ | | 10 | 10 |
| 3. | Kecukupan | √ | | 10 | 10 |
| 4. | Perataan | √ | | 10 | 10 |
| 5. | Responsifitas | √ | | 10 | 10 |
| 6. | Ketepatan | √ | | 10 | 10 |

Sumber : Peneliti, 2011

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa program perbaikan rumah yang dilakukan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan sudah bisa memenuhi semua indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn. Hal ini juga berarti pelaksanaan program perbaikan rumah yang dilakukan PNPM Mandiri di kelurahan Peninggilan sudah sangat baik. Terlihat dari skor maksimal yang didapat pada program perbaikan rumah ini.

Tabel 11
Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan Tahun 2009
Program Perbaikan Saluran Air

| No. | Indikator | Terpenuhi | Tidak terpenuhi | Skor | Skor maksimal |
|-----|---------------|-----------|-----------------|------|---------------|
| 1. | Efektifitas | √ | | 10 | 10 |
| 2. | Efisiensi | √ | | 10 | 10 |
| 3. | Kecukupan | √ | | 10 | 10 |
| 4. | Perataan | √ | | 10 | 10 |
| 5. | Responsifitas | √ | | 10 | 10 |
| 6. | Ketepatan | √ | | 10 | 10 |

Sumber : Peneliti, 2011

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan program perbaikan saluran air PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan sangat baik. Terlihat dari pelaksanaan program yang memenuhi semua indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn dan juga perolehan skor maksimal yang didapat dari program ini. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pelaksanaan program ini bisa dikatakan berhasil

Tabel 12
Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan Tahun 2009
Program Pembangunan Paving Blok

| No. | Indikator | Terpenuhi | Tidak terpenuhi | Skor | Skor maksimal |
|-----|---------------|-----------|-----------------|------|---------------|
| 1. | Efektifitas | √ | | 10 | 10 |
| 2. | Efisiensi | √ | | 10 | 10 |
| 3. | Kecukupan | √ | | 9 | 10 |
| 4. | Perataan | √ | | 9 | 10 |
| 5. | Responsifitas | √ | | 10 | 10 |
| 6. | Ketepatan | √ | | 10 | 10 |

Sumber : Peneliti, 2011

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan program pembangunan paving blok PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan sangat baik. Walaupun terlihat adanya skor yang berbeda pada indikator kecukupan namun pelaksanaan pembangunan paving blok masih bisa dikatakan sangat baik karna jumlah skor yang tidak jauh berbeda dengan skor pada pelaksanaan perbaikan saluran air dan perbaikan rumah. Selain itu hal ini juga terlihat dari pelaksanaan program yang memenuhi semua indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn.

Dari tiga program infrastruktur yang dilakukan PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan tahun 2009 dapat dilihat bahwa ketiga program tersebut semuanya bisa memenuhi indikator-indikator yang telah ditetapkan pada teori evaluasi menurut William N. Dunn. Pada program perbaikan rumah semua indikator telah dapat dipenuhi pada pelaksanaan PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan. Kemudian pada perbaikan saluran air dan paving blok juga sama. Jadi berdasarkan tabel di atas evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri kelurahan Peninggilan tahun 2009 sudah berjalan dengan baik.

4.3. Temuan Lapangan

Pada pelaksanaan PNPM Mandiri program infrastruktur secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun sayangnya, berdasarkan apa yang peneliti temukan di lapangan khususnya pada pembangunan paving blok ada beberapa paving blok yang keberadaannya kurang terawat. Bila digambarkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Status kondisi pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri

| Nama KSM | Lokasi | Kondisi Bangunan | Papan Nama Kegiatan PNPM Mandiri | | Prasasti | |
|--------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-------|----------|-------|
| | | | Ada | Tidak | Ada | Tidak |
| KSM Barokah | RT.02/11 | Terawat | | √ | √ | |
| KSM Basma | RT.01/07 | Terawat | | √ | √ | |
| KSM Berhasil | RT.02/04 | terawat | | √ | √ | |
| KSM Bina Umat I | RT.01/01 | Terawat | √ | | √ | |
| KSM Bina Umat II | RT.02/09 | Terawat | | √ | √ | |
| KSM Bina Sejahtera | RT. 01/13 | Teawat | √ | | √ | |
| KSM Hasanah | RT. 01/07 | Terawat | | √ | √ | |
| KSM Makmur | RT.02/13 | Terawat | | √ | √ | |
| KSM Seroja | RT.01/07 | Terawat | | √ | √ | |
| KSM Sejati | RT.01/04 | Terawat | | √ | √ | |
| KSM Usaha Bersama | RT.01/11 | Terawat | | √ | √ | |

Berdasarkan observasi peneliti dan tabel diatas semua hasil kegiatan infrastruktur masih dalam kondisi yang baik. Misalnya kondisi paving blok yang masih baik, kondisi rumah yang tetap terjaga dan kondisi saluran air yang masih tetap terawat. Namun dibalik itu semua dari sebelas hasil kegiatan infrastruktur yang dilakukan PNPM Manditi di kelurahan Peninggilan hanya ada dua lingkungan yang paving bloknya masih terdapat papan nama kegiatan PNPM Mandiri 2009. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa ketua KSM tidak terdapatnya papan nama kegiatan pada lingkungan mereka disebabkan karna hilang. Selain itu adapula yang menyatakan bahwa

papan nama kegiatan yang ada di lingkungan mereka sudah dilepas ketika beberapa bulan pembangunan infrastruktur

Berbeda halnya dengan keberadaan prasasti di lingkungan kelurahan Peninggilan. Prasasti tersebut masih terlihat rapi dan utuh keberadaannya. Hal ini mungkin disebabkan karena bahan dasar pembuat prasasti yang cukup kokoh sehingga keberadaannya masih utuh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan tahun 2009 sudah berjalan baik. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu:

1. Secara keseluruhan pelaksanaan PNPM Mandiri sudah bisa mencapai hasil yang di inginkan.
2. Alokasi dana dapat dimanfaatkan secara tepat oleh KSM dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di kelurahan Peninggilan.
3. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan sudah bisa mencukupi kebutuhan infrastruktur di lingkungan masyarakat Kelurahan Peninggilan.
4. Hasil atau manfaat dari pelaksanaan program infrastruktur kegiatan infrastruktur sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat kelurahan peninggilan.
5. Responsifitas para pengurus BKM dan fasilitator kelurahan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri program infrastruktur di Kelurahan Peninggilan cukup baik.
6. Hasil atau manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program infrastruktur PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan sudah tepat sasaran dan tepat guna.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti peroleh, maka peneliti memberikan saran kepada pengurus dari BKM Amanah mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Peninggilan yang nantinya akan jadi bahan masukan dan pembelajaran untuk ke depannya. Saran peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Para pengurus BKM sebaiknya lebih teliti lagi dalam mendata para penerima manfaat PNPM Mandiri.
2. BKM Amanah kelurahan Peninggilan sebaiknya menambah jumlah sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Peninggilan.
3. BKM Amanah dan fasilitator kelurahan harus melakukan sosialisasi secara rutin kepada KSM dan masyarakat agar masyarakat lebih mengerti tentang pelaksanaan program infrastruktur yang dilakukan PNPM Mandiri.
4. BKM Amanah harus mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para KSM dan masyarakat secara rutin.
5. Masyarakat harus aktif dan rajin mengikuti sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang diberikan PNPM Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- LAN. 2005. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia & Efektivitas Organisasi Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, Matthew, Michael Hubermann. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara

Wibowo, Eddi, dkk.2004. *Kebijakan Publik dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)

Sumber lain :

Hadiyanti, Puji. 2006. Kemiskinan&Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Hal. 33-46

<http://andist.wordpress.com/2008/03/21/pengertian-kemiskinan/> diakses pada 16 Mei 2010

<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-masyarakat-dan-pembangunan-berkelanjutan.html> diakses pada 16 Mei 2010

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

Pencairan Dana BLM PNPM MP Tahap I/ TA 2009

PJM Pronangkis Kelurahan Paninggilan Ciledug Periode Tahun 2010-2012 Kota Tangerang Provinsi Banten.

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

Kegiatan Wawancara Peneliti Dengan Informan





Kantor Sekretariat BKM Amanah Kelurahan Peninggilan



Hasil Kegiatan Infrastruktur PNPM Mandiri Kelurahan Peninggilan Tahun

2009

1. Pembangunan paving Blok



2. Perbaikan Saluran Air



3. Perbaikan Rumah

